



**PENGARUH PENDIDIKAN FORMAL TERHADAP PARTISIPASI  
DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA SEMPU DAN TEGALARUM  
(STUDI TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM  
PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh :

**AHMAD FAUZI**

NIM. 960910201096

Pembimbing :

- I. Prof. Drs. Toekidjan Ps
- II. Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Th. 2001**

Asal	06 NOV 2001	Klass
Terima Di:	06 NOV 2001	352
No. Induk :	10236836	TAU
		P a . 1

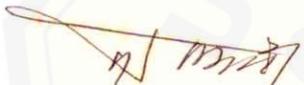
**PENGESAHAN**

Diterima dan dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi  
guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I  
Jurusan Ilmu Administrasi, Progam Studi Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Pada :  
Hari/ Tanggal : Senin/ 01 Oktober 2001  
Jam : 08.00 WIB – Selesai

**Panitia Penguji**

Ketua

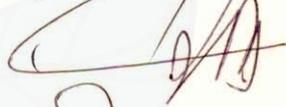
  
Drs. H. Humaidi, SU

Sekretaris

  
Prof. Drs. Toekidjan P

Susunan Tim Penguji:

1. Drs. H. Humaidi, SU
2. Prof. Drs. Toekidjan Ps
3. Drs. A Kholiq A, Msi
4. Drs. H. Hendro Mulyono
5. Drs. Anwar, Msi

 )  
 )  
 )  
 )  
 )

Dekan Fisip

Universitas Jember



  
Drs. H. M Toerki  
NIP. 130.524.832

MOTTO

*Kebenaran saat ini  
Bukanlah berarti kebenaran saat nanti  
Kebenaran bukanlah kenyataan  
(Dewa Bintang Lima)*

*Berpikirlah seperti orang yang bisa bertindak  
Bertindaklah seperti orang yang bisa berpikir  
(motto pribadi)*



*PERSEMBAHAN*

- 1. Bapak, Ibu dan adik-adikku Erit, Win, Dhony yang senantiasa memberikan segalanya demi kesuksesan dan keberhasilanku.*
- 2. Almamaterku yang aku banggakan.*



*PERSEMBAHAN*

1. Bapak, Ibu dan adik-adikku Erit, Win, Dhony yang senantiasa memberikan segalanya demi kesuksesan dan keberhasilanku.
2. Almamaterku yang aku banggakan.



## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi, Progam Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Dalam Penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan dan penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs H.M Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Prof. Drs. Toekidjan Ps, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
3. Bapak Drs. Abdul Kholiq Azhari Msi, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin Msi, selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi.
5. Bapak Drs. Boediono Msi, selaku ketua progam studi administrsi negara.
6. Ibu Dra. Nasikah Hadi, selaku dosen wali.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
8. Segenap perangkat Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Banyuwangi dan juga Bapak Camat beserta perangkat Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.
9. Saudara Didik Cahyono Psi, selaku fasilitator P2KP BKM Kenanga yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam pengumpulan data.
10. Saudara Kukun, terima kasih atas segalanya.

11. Anggota masyarakat BKM Kenanga desa Sempu dan Tegalarum.
12. Kedua orang tuaku, adik-adikku, dan seluruh keluargaku yang telah memberikan segalanya, do'a, semangat dan harapan demi kesuksesan penulis.
13. Bagian diriku yang telah kutemukan, yang telah mengisi hari-hariku dan juga memberikan semangat dan dorongan dalam penulisan ini.
14. Keluarga adikku Maya, yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang selama penulis studi di Jember.
15. Rekan-rekan komisariat Fisipol, yakin usaha sampai.
16. Teman-teman Bangka III/19, yang memberikan keceriaan dan kompak selalu.
17. Sahabatku Lukman, stay cool forever.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, semoga amal soleh serta budi baik semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, amin.

Skripsi ini penulis sadari masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan petunjuk dari semua pihak penulis harapkan dengan segala kerendahan hati. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis khususnya dan pembaca umumnya.

September 2001

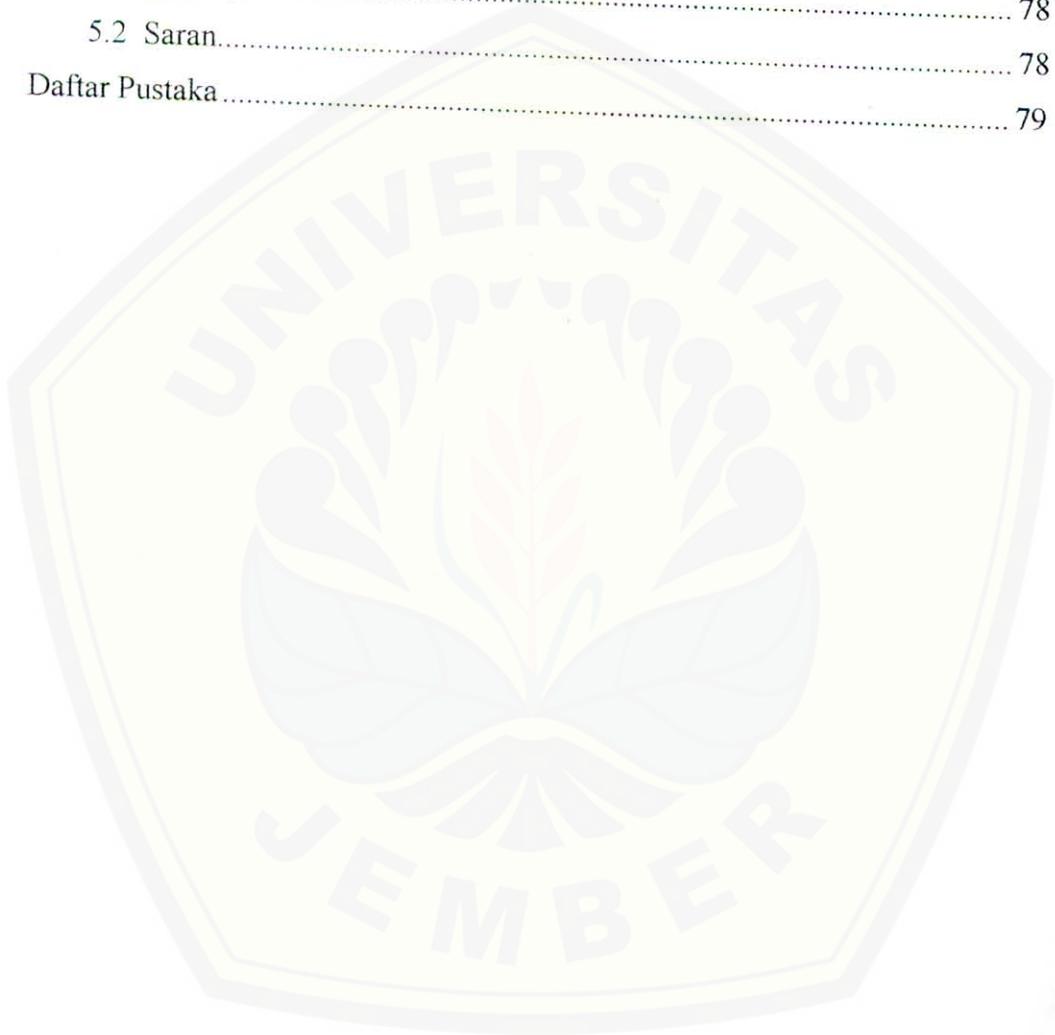
Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Motto.....	ii
Halaman Persembahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Bagan.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	12
1.4 Kerangka Teori.....	12
1.4.1 Konsep Pendidikan.....	22
1.4.2 Konsep Partisipasi.....	24
1.4.2.1 Partisipasi dalam pembuatan keputusan.....	29
1.4.2.2 Partisipasi dalam pelaksanaan.....	30
1.4.2.3 Partisipasi terhadap hasil pembangunan.....	31
1.4.2.4 Partisipasi dalam evaluasi.....	31
1.5 Hipotesis.....	32
1.6 Definisi Operasional.....	33
1.6.1 Operasionalisasi variabel pengaruh tingkat pendidikan formal.....	34

1.6.2	Operasionalisasi variabel terpengaruh	
	partisipasi masyarakat.....	35
1.7	Metode Penelitian .....	36
1.7.1	Penentuan populasi.....	37
1.7.2	Penentuan sampel.....	37
1.7.3	Metode pengumpulan data .....	39
1.7.3.1	Metode interview .....	39
1.7.3.2	Metode dokumentasi.....	39
1.7.3.3	Metode kuisisioner .....	40
1.7.4	Metode analisa data.....	40
BAB II DESKRIPSI UMUM PROGRAM P2KP .....		42
2.1	Latar Belakang.....	42
2.2	Tujuan .....	43
2.3	Strategi Program P2KP.....	43
2.4	Struktur Organisasi P2KP.....	44
2.5	Penetapan Lokasi Penerima Bantuan.....	46
2.6	P2KP Banyuwangi.....	48
BAB III PENYAJIAN DATA VARIABEL PENELITIAN.....		54
3.1	Pengantar.....	54
3.2	Variabel tingkat pendidikan formal .....	54
3.3	Variabel partisipasi masyarakat .....	58
3.3.1	Partisipasi dalam pembuatan keputusan.....	59
3.3.2	Partisipasi dalam pelaksanaan.....	62
3.3.3	Partisipasi terhadap hasil pembangunan.....	65
3.3.4	Partisipasi dalam evaluasi .....	68
BAB IV ANALISIS DATA.....		74
4.1	Pengantar.....	74
4.2	Penerapan Analisis Chi square.....	74
4.2.1	Memasukkan frekuensi observasi kedalam tabel persiapan.....	75

4.2.2 Menentukan db untuk menentukan taraf signifikansi .....	76
4.2.3 Menghitung nilai Chi square .....	76
4.2.4 Menentukan signifikansi $X^2$ observasi kedalam acuan tabel distribusi Chi square.....	77
BAB V PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan .....	78
5.2 Saran.....	78
Daftar Pustaka .....	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data jawaban responden terhadap indikator pendidikan formal.....	56
Tabel 2 : Distribusi frekuensi tingkat pendidikan formal .....	58
Tabel 3 : Skor jawaban responden terhadap indikator partisipasi dalam pembuatan keputusan.....	60
Tabel 4 : Skor jawaban responden terhadap indikator partisipasi dalam pelaksanaan.....	63
Tabel 5 : Skor jawaban responden terhadap indikator partisipasi terhadap hasil pembangunan .....	66
Tabel 6 : Skor jawaban responden terhadap indikator partisipasi dalam evaluasi .....	69
Tabel 7 : Distribusi frekuensi partisipasi masyarakat .....	71
Tabel 8 : Kategori jawaban tingkat pendidikan formal dan partisipasi masyarakat.....	72
Tabel 9 : Tabel persiapan untuk mengetahui tingkat pendidikan formal terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik pada progam P2KP di desa Sempu dan Tegalarum.....	75

**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 : Alur usulan dalam P2KP .....	5
Bagan 2 : Struktur organisasi pelaksanaan P2KP .....	45
Bagan 3 : Struktur organisasi dalam personalia BKM Kenanga.....	50



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar pertanyaan
2. Tabel C (tabel harga-harga kritis Chi kuadrat)
3. Ijin penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
4. Ijin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Banyuwangi
5. Ijin penelitian dari Kantor Kecamatan Sempu
6. Surat Keterangan dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kenanga



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan diantara pemenuhan kebutuhan lahiriah dan batiniah, yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata.

Di Indonesia konsep pembangunan yang diterapkan adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional tersebut dilaksanakan secara berencana dan bertahap dalam bentuk rencana pembangunan lima tahun (REPELITA) yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan nasional bertujuan sebagaimana termaktub dalam **Tap MPR No. IV/MPR/1999** tentang garis-garis besar haluan negara (GBHN) adalah:

“Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya”.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan untuk meningkatkan kualitas manusia seutuhnya dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera.

Pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia harus mencerminkan pembangunan yang menyeluruh dari semua aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, maupun sosial budaya dan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya

menguntungkan sebagian orang saja tetapi dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat kecil atau masyarakat miskin.

Menyinggung masalah pembangunan dalam memerangi kemiskinan maka **Bryant dan White** berpendapat:

“Pembangunan mencakup pengertian menjadi dan mengerjakan. Perampasan, kesewenangan, kemiskinan dimanapun itu terjadi semuanya menandakan keterbelakangan, dan sangat penting untuk mengerjakan hal-hal tertentu untuk mengurangi kemiskinan”(1989:21)

Jadi dapat dikatakan bahwa dalam lingkungan yang miskin dan terkuras, yang paling utama ialah mengerjakan sesuatu. Dengan demikian perhatian akan banyak tertuju pada perencanaan dan pelaksanaan serta pengelolaan proyek dan program untuk mewujudkan perubahan yang nyata dan bermakna di lingkungan rakyat.

Lebih lanjut **Bryant and White** mengatakan bahwa:

“Kemiskinan merendahkan harkat manusia dan menggerogoti semangat serta kemampuannya, dengan demikian perubahan haruslah memperhitungkan keunikan individu, sehingga dalam pembangunan tercakup pengertian menjadi dan mengerjakan”(1989:21).

Hal ini dapat diartikan bahwa proyek dan program-program bukan saja perlu membuahkan perubahan-perubahan yang fisik dan kongkrit, melainkan juga perlu menghasilkan hal-hal “*menjadi*” dan “*mengerjakan*”, dengan cara tertentu sehingga rakyat memperoleh kemampuan yang lebih besar untuk memilih dan memberikan tanggapan terhadap perubahan-perubahan tersebut. Ini berarti bahwa perubahan yang terencana harus memperhatikan potensi individu-individu disamping memperhatikan potensi otonomi mereka sebagai pribadi.

Menyinggung masalah kemiskinan di Indonesia, semenjak krisis moneter yang diikuti dengan krisis ekonomi yang melanda pada pertengahan tahun 1997, yang berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Menurut **Ginandjar Kartasasmita** (Republika 3 Agustus 1993) mengatakan :

“Kemiskinan ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Keadaan kemiskinan umumnya diukur dari tingkat pendapatan”.

Keadaan kemiskinan yang terjadi seperti sekarang ini, juga merupakan akibat dari strategi pembangunan yang lebih menekankan pada pertumbuhan saja, tidak memperhatikan aspek pemerataan. Padahal untuk mewujudkan pemerataan tidak semudah memacu pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya semakin lebar.

Pada perkembangan berikutnya, maka paradigma perekonomian mulai bergeser kearah pengembangan ekonomi kerakyatan, yang berorientasikan pada usaha pemerataan. Diantaranya yaitu Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

Progam penanggulangan kemiskinan yang dimulai sejak pelita pertama sudah menjangkau seluruh pelosok tanah air. Upaya itu telah menghasilkan perkembangan yang positif. Namun demikian, krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah mengecilkan arti berbagai pencapaian pembangunan tersebut.

Krisis tersebut pada satu sisi telah menimbulkan lonjakan pengangguran dan dengan cepat meningkatkan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Karena itu, krisis juga telah menyadarkan kita bahwa pendekatan yang dipilih dalam penaggulangan kemiskinan perlu dikoreksi atau diperkaya dengan upaya untuk mengokohkan keberdayaan institusi komunitas agar pada masa berikutnya upaya penaggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

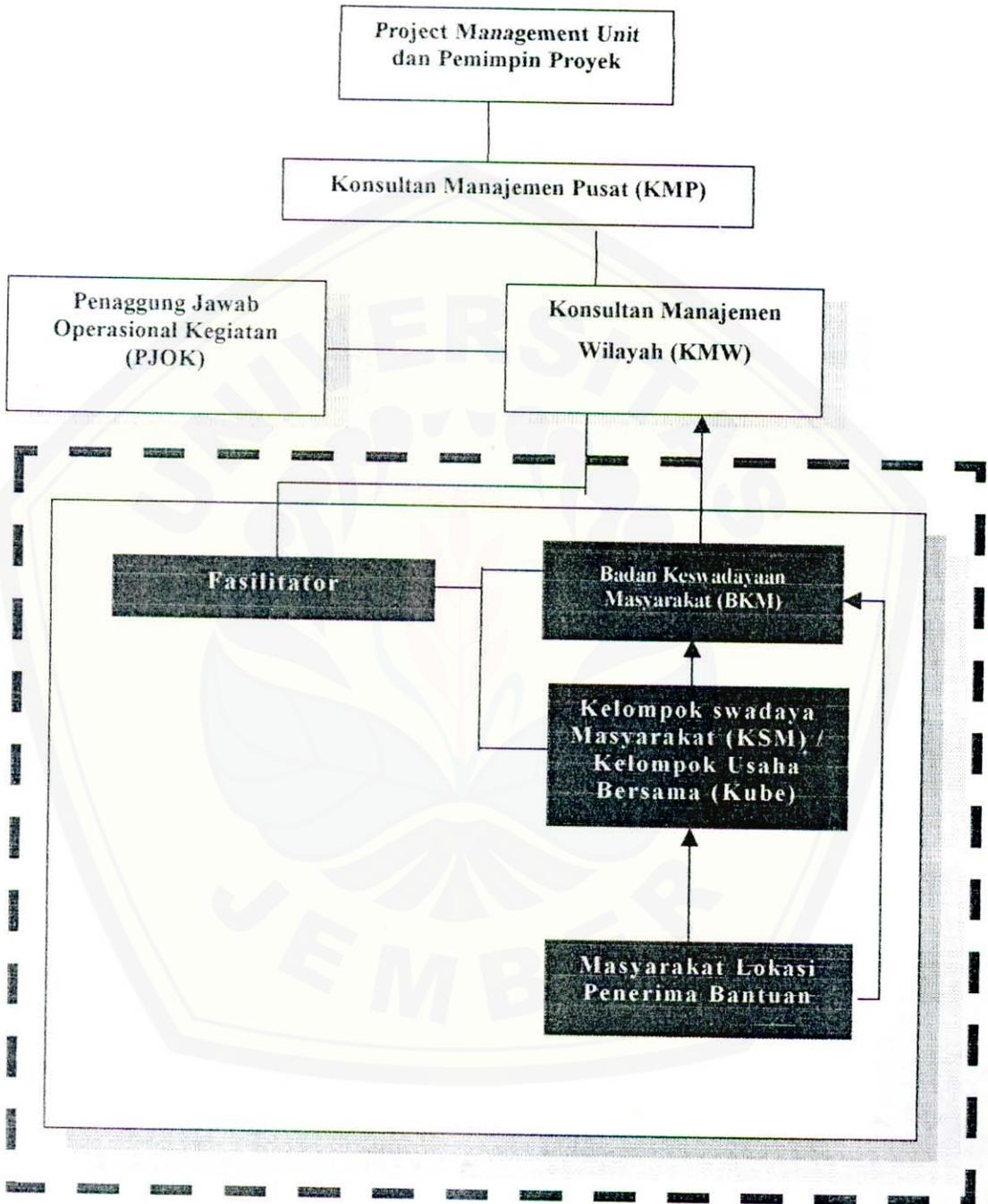
Oleh karena itu, khusus untuk menangani persoalan kemiskinan di perkotaan, Pemerintah telah merancang suatu proyek yang diharapkan dapat lebih terjamin keberlanjutannya, yaitu P2KP- Proyek Penaggulangan Kemiskinan di

Perkotaan (Urban Poverty Project). Proyek ini mempunyai strategi dan orientasi yang lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan institusi lokal. Kedua hal itu dinilai merupakan syarat menuju terbentuknya masyarakat yang mampu mengatasi persoalan kemiskinan yang dihadapinya secara berkelanjutan.

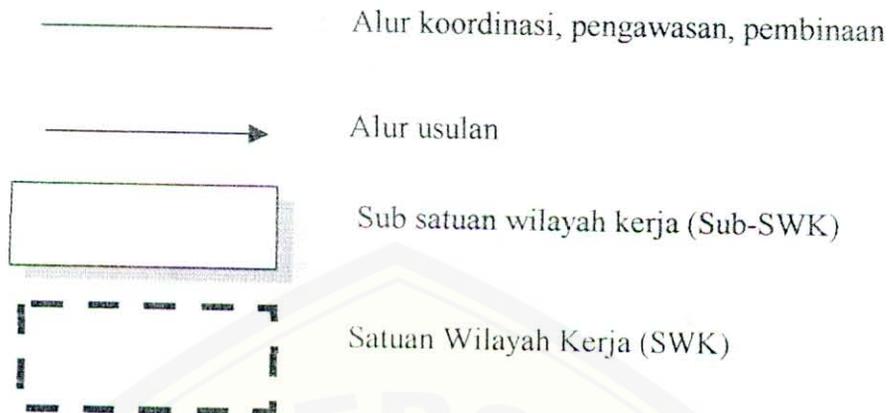
Didasarkan atas misi diatas, proyek ini menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama proyek, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan, dengan intensitas keterlibatan sampai pada tingkat pengambilan keputusan. Cara yang ditempuh adalah dengan menyediakan bantuan keuangan serta bantuan teknis dan membangun rasa saling mempercayai antar berbagai pihak yang terlibat. Pengokohan rasa saling mempercayai ini diharapkan dapat dicapai melalui pemahaman dan pelaksanaan prinsip-prinsip keterbukaan, kemitraan, kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan serta keadilan dan kejujuran dalam kegiatan proyek sehari-hari.

Bantuan kepada masyarakat miskin ini diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan masyarakat dan dalam bentuk pendampingan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dana bantuan P2KP merupakan dana hibah dan pinjaman yang disalurkan kepada kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) secara langsung dengan sepengetahuan konsultan yang mengelola P2KP disuatu wilayah kerja, sepengetahuan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) yang ditunjuk, dan sepengetahuan warga masyarakat setempat melalui kelembagaan masyarakat yang dibentuk. Dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai usaha modal produktif, pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan, serta pengembangan sumber daya manusia.

Bagan 1  
Alur usulan dalam P2KP



Keterangan bagan :



Dana yang dipergunakan untuk modal usaha produktif merupakan dana pinjaman bergulir yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat melalui suatu wadah yang dibentuk oleh masyarakat, dibantu oleh konsultan manajemen wilayah (KMW). Wadah dimaksud merupakan kelembagaan masyarakat yang disebut badan keswadayaan masyarakat (BKM), yang beranggotakan para tokoh masyarakat dan perwakilan KSM, serta warga.

Sementara dana untuk pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan merupakan dana hibah yang tidak perlu dikembalikan, namun masyarakat harus menunjukkan kesanggupan dan tanggung jawabnya untuk dapat melakukan pemeliharaan serta pengembangan lebih lanjut. Dana hibah ini diprioritaskan kepada jenis-jenis prasarana dan sarana yang dapat memberikan dampak langsung kepada peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat. Pembangunan prasarana dan sarana yang dimaksud disini dapat berupa pembangunan yang baru dan perbaikan yang lama.

Pengelolaan seluruh kegiatan, baik pengembangan usaha maupun pembangunan prasarana dan sarana, pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sendiri. mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pemeliharaan, semuanya dilakukan dengan pendekatan bertumpu pada kelompok. Pendekatan semacam ini

menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini sedapat mungkin bersifat padat karya dan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, serta memperkuat kelembagaannya.

Seperti dijelaskan diatas bahwa proyek P2KP ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proyek, sehingga disini masyarakat merupakan faktor yang sangat penting karena dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan. Sehingga dapat dikatakan bahwa berhasil dan tidaknya progam ini ditentukan oleh partisipasi masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pendapat **Keith Davis** dalam bukunya **Taliziduhu Ndraha** menyatakan bahwa pembangunan terdiri beberapa input antara lain:

1. Partisipasi
2. Tenaga terlatih
3. Biaya
4. Logistik
5. Informasi
6. Kewenangan dan dasar hukum(1990:101)

Jadi jelaslah bahwa dalam pembangunan diperlukan suatu sikap kesadaran untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga akan tercapai tujuan dari pembangunan itu sendiri. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan, maka keterlibatan masyarakat sangat menentukan, oleh karena itu tanpa partisipasi masyarakat, proses pembangunan akan mengalami hambatan bahkan akan terjadi kemacetan.

Beberapa alasan yang dapat mendukung pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan antara lain:

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
2. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat.

3. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi.
4. Pembangunan lebih baik dimulai dari mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
5. Partisipasi memperluas zone dan memperluas pembangunan.
6. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi aktualisasi potensi manusia.
7. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak demokarasi individu untuk dilibatkan dalam pembangunan.
8. Partisipasi merupakan cara efektif untuk membangun kemampuan masyarakat dalam mengelola progam pembangunan dalam upaya memenuhi kebutuhan kas daerah” Ibid (1990:101).

Oleh karena itu didalam melaksanakan pembangunan, peran serta dari masyarakat tidak bisa diabaikan, karena pada dasarnya keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan dukungan dan partisipasi dari masyarakatnya, sehingga dengan demikian mereka merasa bahwa dirinya tidak hanya sekedar sasaran pembangunan saja melainkan merupakan faktor yang menentukan berhasil dan tidaknya suatu pembangunan. Dengan demikian akan menimbulkan dan menggerakkan mereka untuk ikut serta didalam proses pembangunan, karena mereka sadar bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan peran serta dari masyarakatnya.

Sungguhpun demikian partisipasi bukanlah semata-mata melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Menurut **Bryant** dan **White** mengatakan:

"dalam partisipasi tersirat makna dan integritas keseluruhan proyek itu. Partisipasi merupakan sikap keterbukaan terhadap perspsi dan perasaan pihak lain. Partisipasi berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan suatu proyek sehubungan dengan kehidupan masyarakat. Partisipasi adalah kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan"(1989:268).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang dilakukan secara sadar dan sukarela, artinya mereka sadar bahwa dengan berpartisipasi pada akhirnya dapat memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sesuai dengan pendapat **Peter M. Blau** dalam bukunya **Taliziduhu Ndraha** mengatakan "dalam partisipasi masyarakat berlaku pula prinsip pertukaran dasar (basic exchange principles), yaitu semakin banyak manfaat yang diduga akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, maka akan semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan itu" (1990:105).

Dari pengertian diatas, dalam penulisan skripsi kali ini penulis mencoba meneliti keterlibatan masyarakat desa Sempu dan Tegal Arum dalam proyek P2KP terutama dalam pembangunan sarana jembatan. Apakah keterlibatan tersebut merupakan partisipasi atau hanya merupakan mobilisasi masyarakat dalam proses pembangunan. Disini yang membedakan adalah bila partisipasi maka keterlibatan masyarakat dilakukan dengan sukarela dan sadar akan manfaatnya, sedangkan mobilisasi, keterlibatan tersebut dilakukan terpaksa tanpa tahu manfaat kegiatan yang dilakukan.

Seperti diuraikan diatas bahwa keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari partisipasi masyarakatnya atau dengan kata lain partisipasi masyarakat sangat menentukan berhasil dan tidaknya pembangunan, dan partisipasi masyarakat tersebut timbul karena adanya kesadaran mengenai manfaat dari partisipasi yang dilakukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kesadaran adalah tingkat pendidikan, yang dalam hal ini adalah pendidikan formal. Dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah maka akan terasa sulit untuk merubah sikap mental masyarakat kearah pembangunan. Hal ini merupakan suatu kendala atau hambatan didalam menggugah kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi didalam pembangunan. Dengan demikian faktor tingkat pendidikan cenderung berkorelasi atau berpengaruh dengan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat **Bintoro Tjokroamidjojo**, yang mengatakan sebagai berikut:

Tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan kesadaran yang lebih tinggi dalam berwarga negara dan memudahkan bagi pengembangan identifikasi terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang bersifat nasional. Bahkan pendidikan memberikan prasyarat kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang dan disertai pengembangan nilai-nilai dan sikap-sikap hidup sebagai bangsa” (1986:27).

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka seseorang akan mempunyai kesadaran yang lebih tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam suatu program pembangunan, karena dengan semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin sadar orang tersebut bahwa partisipasi yang dilakukan pada akhirnya juga bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan pada akhirnya partisipasi tersebut dilakukan dengan sukarela.

## 1.2 Perumusan Masalah

Problema atau masalah dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang harus ada, karena dengan adanya suatu masalah cenderung mendorong seorang peneliti untuk memecahkannya.

Masalah menurut **Surachmad** memberikan pengertian sebagai berikut :” masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui (dengan jalan mengatasinya ) apabila kita ingin berjalan terus” (1982:84).

Agar masalah mempunyai arti yang jelas maka masalah tersebut harus memenuhi beberapa syarat seperti yang diungkapkan oleh **A. A. Loedin** yaitu:

1. Menunjukkan hubungan dua variabel atau lebih
2. Persoalan harus ditegaskan dengan bahasa yang jelas untuk memudahkan dituangkan dalam kalimat tanya
3. Persoalan harus memungkinkan pengukuran secara empirik (1976:11)

Dalam penulisan penelitian skripsi kali ini, masalah yang akan dibahas adalah merupakan masalah yang akan menguji hubungan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat dalam program P2KP, atau dengan kata lain ingin menguji hubungan dua variabel penelitian, yaitu variabel independent dengan variabel dependent (X dan Y). Dengan demikian, secara singkat dapat dipaparkan perumusan masalahnya yaitu :

**“Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan formal terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik pada program P2KP?”**

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah harus mempunyai tujuan, karena tanpa adanya tujuan tersebut suatu karya ilmiah tidak akan bermanfaat. Dengan adanya suatu tujuan yang pasti, maka suatu penelitian akan dapat menjembatani dunia konsep dan dunia empiris

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari suatu penelitian sangat penting untuk dirumuskan karena ini sangat menentukan dalam hal memberikan arahan bagi suatu jawaban atas hipotesis yang kita buat, seperti yang tertulis dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Jember bahwa “Tujuan berkaitan erat dengan masalah dan merupakan arahan jawaban dari hipotesis”(1998:15). Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran tingkat pendidikan masyarakat di lokasi penelitian
2. Untuk memperoleh gambaran tingkat partisipasi masyarakat terutama dalam program P2KP
3. Untuk mengetahui ada / tidaknya pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program P2KP

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Dapat menambah pengalaman dan wawasan bagi penulis dalam mempraktekkan teori yang telah diterima dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
2. Hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapat memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

### 1.4 Kerangka teori

Sebelum penulis menguraikan kerangka teori, untuk lebih baiknya penulis kemukakan terlebih dahulu pengertian dari teori, menurut **Singarimbun** dan **Effendi** menjelaskan "teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep" (1989:37).

Sedangkan yang dimaksud dengan konsep menurut **Singarimbun** dan **Effendi** adalah :

"Konsep yakni istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan lainnya"(1989:33).

Jadi konsep merupakan istilah atau definisi singkat dari suatu gejala yang akan diteliti yang dapat menghubungkan dunia observasi dan dunia teori, atau dengan kata lain antara abstrak dan realitas.

Negara Indonesia, untuk dapat mencapai kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ditempuh melalui pembangunan. Akan tetapi apakah yang sesungguhnya diartikan pembangunan itu, masyarakat luas khususnya rakyat kecil belum memahami sepenuhnya, bahkan seringkali menimbulkan tanda tanya, sebab bermacam-macam ungkapan dilontarkan terhadap khalayak ramai.

Ditinjau dari segi tata bahasa, pembangunan mengandung lebih dari satu pengertian. Kata pembangunan berasal dari kata bangun, yang sedikitnya dua

pengertian yaitu bangun = bentuk, dan bangun = sadar. Dengan demikian maka pembangunan berarti terus menerus membentuk atau mendirikan dan juga dapat berarti terus menggugah kesadaran. Apabila dua pengertian tentang pembangunan itu digabungkan dan dijadikan satu kesatuan maka pengertian pembangunan itu adalah terus menerus menciptakan perubahan sosial serta pertumbuhan ekonomi yang dipercepat. Dengan perubahan sosial yaitu dengan masyarakat semakin bergairah, makin tekun dan makin tinggi pengetahuan dan ketarampilan dan ketarampilannya, maka makin tinggi pula produktivitas dan dengan produktivitas yang makin tinggi itu akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang makin cepat dan dengan pertumbuhan ekonomi yang demikian maka akan semakin besar dan terbuka kesempatan dan lapangan kerja baru, sehingga membawa kearah perubahan struktur sosial.

Dalam melaksanakan pembangunan suatu negara menggunakan strategi pendekatan yang berbeda, yang menurut **Korten** menjelaskan tentang model-model pembangunan yaitu, yang pertama model pembangunan yang terpusat, model pembangunan ini berkembang tahun 1950-an dimana logika dasar dari pendekatan pembangunan ini adalah logika produksi, tujuan utamanya adalah mencapai dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Berperan sangat sentral didalam menjamin pencapaian tujuan tersebut adalah mobilisasi orientasi nilai-nilai, sistem-sistem dan metode-metode untuk menciptakan suatu masyarakat konsumen massal yang memiliki kemampuan untuk mengabsorsi arus produksi barang-barang dan jasa-jasa yang terus meningkat. Kritik dari pendekatan model ini adalah:

- a. mengabaikan inisiatif lokal.
- b. Membuat masyarakat tergantung pada birokrasi pusat yang
- c. kurang memiliki kemampuan untuk menanggapi kebutuhan lokal.

model yang kedua adalah model pembangunan berwawasan pemerataan. Model pembangunan ini muncul tahun 1970-an untuk menjawab tantangan yaitu:

- a. Penghapusan kemiskinan
- b. Pelestarian kapasitas produktif lingkungan hidup.

c. Peningkatan kekuasaan rakyat melalui partisipasi

Didalam konteks ini muncul dua varian model pembangunan alternatif, yaitu

1. Redistribusi dengan pertumbuhan.

Kendati model ini menaruh konsentrasi pada pertumbuhan, ia secara lebih eksplisit menaruh perhatian pada penanganan masalah kemiskinan melalui sejumlah kebijaksanaan redistribusi. Penekanan utama dari model pembangunan pemerataan dengan pertumbuhan adalah pergeseran pola dan struktur pertumbuhan pendapatan dan kepemilikan aset-aset produktif.

2. Pembangunan kebutuhan dasar.

Model ini menekankan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemecahan masalah kemiskinan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan paling dasar masyarakat, seperti air bersih, sanitasi, transportasi kesehatan, pendidikan, dll.

Meskipun kedua varian model pembangunan diatas telah berhasil melontarkan pemikiran-pemikiran baru dan memperkenalkan reformasi prioritas program pembangunan, tetapi model ini masih bergantung pada logika pertumbuhan dan telah membuat lapisan penduduk miskin semakin bergantung pada pelayanan dan program-program pembangunan pemerintah.

model pembangunan yang ketiga adalah Pendekatan pengelolaan sumber daya berwawasan komunitas. model ini merupakan suatu elemen dasar dari suatu strategi pembangunan yang lebih luas yang bertujuan untuk mencapai suatu transformasi pedesaan berdasarkan nilai-nilai yang berpusat pada rakyat.

Ciri-ciri pendekatan pengelolaan sumberdaya berwawasan komunitas adalah:

1. Logika yang mendasarinya adalah logika keseimbangan ekologi manusia.
2. Sumberdaya utama yang mendukungnya adalah sumberdaya informasi yang secara potensial amat kaya inisiatif dan kreatif.
3. Tujuannya adalah untuk mencapai realisasi potensi-potensi kemanusiaan.

Dengan semua ciri-ciri diatas, pendekatan PSBK memberikan peranan warga masyarakat bukan hanya sebagai subyek melainkan lebih-lebih sebagai aktor yang menentukan tujuan-tujuannya sendiri, menguasai sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengarahkan proses-proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri. Sebagai konsekuensinya lebih lanjut, model PSBK memberikan nilai yang sangat tinggi pada inisiatif lokal dan sistem-sistem untuk mengorganisasi diri sendiri melalui satuan-satuan organisasional yang berskala manusiawi dan komunitas-komunitas mandiri.

Meskipun pendekatan PSBK mengakui pentingnya produksi untuk mencapai kesejahteraan dan realisasi diri, perasaan memiliki harga diri yang diperoleh melalui partisipasi didalam kegiatan produksi adalah sdama pentingnya denagn nilai kualitas hidup yang diperoleh dari partisipasi didalam mengkonsumsi produksi yang dihasilkannya. Dengan perkataan lain, penampilan dari sistem produksi harus tidak, terutama diukur berdasarkan nilai produksi yang dihasilkannya, melainkan lebih-lebih didalam hubungannya dengan seberapa luas masyarakat terlibat didalamnya dan seberapa tinggi kualitas situasi kerja yang tersedia bagi mereka. Didalam hubungan itu, salah satu hal yang sangat penting yang membedakan pendekatan PSBK dengan pendekatan yang berpusat pada produksi adalah bahwa pendekatan yang pertama mensubordinasikan kepentingan sistem produksi dibawah kepentingan manusia, sementara pendekatan yang kedua menempatkan kepentingan manusia dibawah subordinasi kepentingan sistem produksi.

Pendekatan PSBK mendefinisikan progam aksinya sebagai upaya memerangi kemiskinan melalui:

1. Penyediaan bantuan pelayanan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang menjajikan perbaiki kondisi-kondisi tempat sebagian besar orang miskin hidup, belajar dan bekerja.
2. Mobilisasi dan pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya publik dan privat.

3. Pengembangan, penyelenggaraan, dan pengelolaan program-program yang sejauh mungkin melibatkan partisipasi penduduk miskin (individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok yang kepentingannya menjadi fokus program yang diselenggarakan).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pendekatan PSBK ini partisipasi masyarakat mutlak diperlukan dimana populasi yang menjadi sasaran secara mendalam berpartisipasi didalam penetapan tujuan-tujuan pengembangan strategi-strategi, perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan, dan pengembangan struktur-struktur untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dari setiap model pembangunan seperti yang dijelaskan diatas, pada dasarnya partisipasi masyarakat diakui keberadaannya didalam proses pembangunan. perspektif yang berbeda-beda mengenai partisipasi ini merupakan bagian dari suatu debat yang lebih luas yang melibatkan teoritis pembangunan, badan-badan donor, para pemimpin dunia ketiga, dan kelompok-kelompok warga masyarakat itu sendiri.

Menurut **Bryant** dan **White** berpendapat yaitu:

"dalam dasawarsa 1950-an dan 1960-an, partisipasi didefinisikan secara politis sepenuhnya, Ia diartikan sebagai pemungutan suara, keanggotaan dalam partai, kegiatan dalam perkumpulan sukarela, gerakan-gerakan protes, dan sebagainya. Partisipasi ditakuti sebagai suatu pengaruh yang memecah belah. Bahkan ditempat dimana partisipasi digalakkan dalam program pembangunan masyarakat, biasanya lingkup partisipasi itu terbatas"(1989:271).

Kekhawatiran yang berlebihan terhadap bahaya-bahaya partisipasi ini selaras dengan definisi pembangunan sebagai sesuatu yang padat modal dan berorientasi pada pertumbuhan (growth-oriented), dan konsisten pula dengan definisi administrasi sebagai suatu struktur hirarki "dari atas kebawah" (top down).

Dalam dasawarsa 1970-an, arti partisipasi dalam konteks pembangunan mulai diberi definisi baru. Partisipasi tidak lagi terutama diidentifikasi sebagai proses politik, melainkan mulai dihubungkan dengan proses administratif. Menurut **Cohen** dan **Uphoff** dalam bukunya **Bryant** dan **White** mengatakan: " perubahan

sikap ini pada mulanya dipacu oleh politisi dan kuat diwarnai pemikiran tentang penanggulangan pemberontakan. Partisipasi dinilai sebagai alternatif bagi gerakan-gerakan revolusioner dan pemberontakan petani"(1989:272). Hal ini dapat diartikan bahwa jika rakyat dapat dimobilisasi menjadi bagian proses pembangunan, berkuranglah kemungkinan mereka untuk dibangkitkan dalam revolusi.

Ditambahkan oleh **Bryant** dan **White** alasan lain bagi perubahan arti ini ialah proses perubahan politik terlalu lugu (*undveloped*), sehingga tidak dapat memancing preferensi atau melibatkan masyarakat, dan dengan demikian partisipasi akan mempunyai dampak yang lebih besar dalam proses pelaksanaan program. Menurut **Merilee Grindle** "proses pelaksanaan mempunyai kemungkinan menjadi arena utama tempat individu dan kelompok dapat mengejar kepentingan-kepentingan yang bertentangan dan bersaing memperebutkan sumber-sumber daya yang langka. Bahkan proses pelaksanaan ini merupakan mata rantai utama dalam interaksi antara pemerintah dan warga negara". Sehubungan dengan hal ini terdapat argumen lain yang agak lebih pesimistis. Dalam karya para ekonom seperti **Keneth Arrow**, terkandung pemikiran bahwa proses politik yang demokratis-betapapun baiknya tetap memiliki kelemahan fatal dan cenderung memantulkan setepat-tepatnya sentimen masyarakat, kecuali jika terdapat situasi dan kondisi tertentu(1989:273). Demikianlah karena berbagai macam alasan, perhatian beralih pada cara-cara melibatkan masyarakat pada tahap pelaksanaan pembangunan dan terutama dalam proses administratif.

Pada perkembangan selanjutnya, berdasarkan penelitian pada proyek-proyek dinegara dunia ketiga, menimbulkan penekanan baru bahwa partisipasi merupakan komponen positif dan penting. Menurut **Uma Lele** dalam bukunya **Bryant dan White** "partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program dapat mengembangkan kemandirian (*self-reliance*) yang dibutuhkan oleh para anggota masyarakat pedesaan demi akselerasi pembangunan"(1989:273). **Uma Lele** berusaha menjelaskan mengapa beberapa proyek lebih berhasil dari pada yang lain. Keberhasilan itu diukur dengan biaya manfaat dan kemampuan proyek untuk

melestarikan diri (*self\_sustaining*). Diungkapkan bahwa hal terbaik untuk memperkirakan keberhasilan ialah banyaknya atau besarnya aksi lokal dalam proyek. Jadi partisipasi didefinisikan sebagai pelibatan diri masyarakat dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan proyek, dan sebagai komitmen dalam bentuk kerja atau uang.

Pada perkembangan terakhir makna partisipasi tersirat dalam pendekatan yang dinamakan "pengembangan masyarakat" (*community development*). Inti pendekatan ini menurut **Bryant** dan **White** "ialah membantu orang untuk menolong dirinya sendiri dalam memperbaiki kondisi materiil dan non-materiil dari kehidupannya, karena diasumsikan bahwa dalam jangka panjang dibidang inilah terletak keselamatan masyarakat itu" Hal yang terdapat dalam pendekatan ini adalah :

1. Partisipasi janganlah dijadikan suatu progam yang terpisah, ia merupakan suatu proses dan oleh sebab itu hendaknya dipadukan dengan kegiatan-kegiatan lain.
2. Partisipasi harus didasarkan pada organisasi-organisasi lokal.
3. Distribusi yang lebih adil akan mendorong lebih banyak partisipasi.
4. Perlu diciptakan mata rantai antara berbagai tingkat, dan hendaknya pembangunan tidak didasarkan pada upaya-upaya yang terpisah-pisah" (1989:276).

Dari pendekatan partisipasi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proyek P2KP pendekatan partisipasi yang dilakukan adalah dengan model pengembangan masyarakat, dimana masyarakat sebagai sasaran pembangunan berpartisipasi aktif dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi.

Nilai strategis dari partisipasi tidak hanya meningkatkan martabat individu dan perasaan sebagai komunitas, tetapi juga menambah kekuatan bagi progam-progam pemerintah dan memberikan alat terhadap tingkat lokal untuk mengontrol aktivitas anggota komunitas tingkat lokal itu sendiri yang biasanya memahami kebutuhannya sendiri dan oleh karenanya harus diberi akses untuk mendiskusikan masalah dan kemudian memutuskannya sendiri.

Kondisi sosio kultur lokal yang berbeda memungkinkan terdapatnya struktur dan proses pengambilan keputusan yang bervariasi antar komunitas, oleh karenanya pendekatan top down dengan menggunakan satu pola akan menimbulkan masalah baik dalam perencanaan maupun implementasi proyek.

**Rogers** dan kawan-kawan (1986) menyebut ada tiga alasan utama perlunya partisipasi kelompok sasaran, yaitu:

1. Tumbuhnya kesadaran diantara banyak bangsa-bangsa dinegara-negara berkembang bahwa sumber daya utama yang penting dalam proses pembangunan adalah manusia itu sendiri.
2. Semakin meningkatnya berbagai macam tanggung jawab sistem pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Pola pembangunan yang tersentralisasi pada umumnya tidak mampu mengakomodasi variasi sosio kultural lokal atau memobilisasi sumber daya lokal yang diperlukan.

Selanjutnya **Rogers** menyatakan ada keuntungan khusus yang diperoleh dari sistem partisipasi tersebut, pertama, masyarakat desa atau masyarakat miskin perkotaan dapat memberikan ide yang bermanfaat. Kedua, memudahkan mereka untuk menyesuaikan ide dari luar sehingga inovasi dapat dilaksanakan dibawah kondisi lokal. Ketiga, mereka dapat bertindak sebagai eksperimenter melalui percobaan teknologi dan susunan organisasi baru. Keempat, mereka dapat juga berpartisipasi dalam keputusan sehingga kebutuhan mereka lebih mudah direfleksikan didalam program pembangunan dan memperkuat komitmen mereka dalam implementasi program.

Sementara definisi partisipasi itu sendiri menurut **Mubyarto** dalam bukunya **Draha** mengatakan bahwa "partisipasi berarti kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi berarti pula keterlibatan seseorang pada bagian kegiatan bersama" (1990:102).

Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan kesediaan seseorang secara sukarela ikut terlibat dalam program pembangunan. Keterlibatan seseorang secara sukarela untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh kesadaran akan manfaat dari partisipasi yang dilakukan. Munculnya kesadaran tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang salah satunya adalah faktor tingkat pendidikan formal. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi terhadap pandangan akan suatu perubahan. Masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi akan cenderung lebih rasional dalam bertindak bila dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah apalagi tidak berpendidikan sama sekali. Oleh karena itu mereka yang berpendidikan tinggi dalam menghadapi gagasan baru atau inovasi akan lebih terbuka, dan pada akhirnya akan dengan sukarela berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan.

Seperti telah diutarakan diatas bahwa tingkat pendidikan seseorang cenderung berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan sikap mental masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini sesuai dengan pendapat **Bintoro Tjokroamidjojo**, yang mengatakan sebagai berikut:

“Tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan kesadaran yang lebih tinggi dalam berwarganegara dan memudahkan bagi pengembangan identifikasi terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang bersifat nasional. Bahkan pendidikan memberikan prasyarat kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang dan disertai pengembangan nilai-nilai dan sikap-sikap hidup sebagai bangsa” (1986:27).

Bahkan pendidikan memberikan prasarat kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang dan pengembangan nilai-nilai dan sikap kualitas hidup sebagai bangsa. Kesadaran dan kemampuan untuk tumbuh sendiri dari masyarakat akan tergantung pada kesediaanya, kualitas pendidikan juga menentukan kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan pembangunan.

Dari pengertian tersebut diatas jelas bahwa masyarakat yang berpendidikan tinggi serta berkualitas mempunyai kesadaran yang cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi didalam pembangunan. **S. P. Siagian** mengatakan bahwa "Pendidikan memberikan kesadaran kepada seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dan positif dalam pembangunan"(1983:63).

Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang dapat memberikan warna perilaku dalam menunjang keberhasilan pembangunan masyarakat. Yang tidak berpendidikan kurang dapat memahami atau kurang mengerti akan tujuan pembangunan, dan mereka mempunyai tanggapan bahwa program pembangunan tersebut tidak dapat memberikan keuntungan bagi mereka.

Hal senada diungkapkan oleh **Crow and Crow** dalam bukunya **Ihsan** menyatakan bahwa salah satu fungsi pendidikan formal adalah:

"Pendidikan formal harus dapat menumbuh-kembangkan seseorang sebagai makhluk individu melalui pembekalan dalam semua bidang studi. Melalui pembekalan materi bidang studi seseorang dikembangkan logikanya, sesuai dengan jenis dan jenjangnya masing-masing, sehingga seseorang dapat berfikir nalar. Untuk mencapai hal tersebut maka sekolah melalui guru-gurunya harus mampu memberikan pengalaman kepada seseorang dalam mengembangkan konsep, prinsip, generalisasi, intelek, inisiatif, kreativitas, kehendak, emosi, tanggung jawab, ketrampilan, dan lain-lain. Dengan perkataan lain sekolah harus mampu menumbuh-kembangkan rana kognitif, afektif, dan psikomotorik agar seseorang mampu menolong dirinya sendiri (dalam hidup di masyarakat maupun untuk kelanjutan studinya)" (1996:30).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat pendidikan formal yang semakin tinggi, maka akan memberikan pengalaman kepada seseorang dalam mengembangkan konsep, prinsip, generalisasi, intelek, inisiatif, kreatifitas, kehendak, emosi, tanggung jawab, ketrampilan, dan lain-lain. Sehingga dengan nilai-nilai tersebut membuat seseorang dengan sukarela dan sadar untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang disebabkan oleh kesadaran akan manfaat

dari partisipasi tersebut sangat besar, baik bagi diri sendiri sebagai individu maupun bagi kelompok.

Oleh karena itu tingkat pendidikan terutama pendidikan formal yang dimiliki oleh seseorang dapat menentukan perilaku mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat didalamnya.

#### 1.4.1 konsep Pendidikan (X1)

Setiap insan yang membutuhkan kelangsungan hidupnya pasti memikirkan pendidikan. Apalagi kalau manusia menginginkan kemajuan. Sehingga apa yang dinamakan pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk membentuk manusia secara mental, fisik dan intelektual agar dapat memberikan kemampuannya untuk menjamin kelangsungan hidup manusia atau masyarakat serta membawa kemajuan baginya. Usaha yang baik tentunya harus dilakukan secara sistematis dan teratur serta menunjukkan kontinuitas (Sayidiman, 1987:90)

Sedangkan menurut **Indrakusuma** mengemukakan "yang dimaksud pendidikan adalah suatu usaha sadar yang teratur dan sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar mempunyai tingkah laku sesuai dengan cita-cita pendidikan"(1975:90).

Menurut **UU RI no. 2 tahun 1989**, "yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya dimasa datang.

Maka pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina keberanian sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan budaya yang berlaku. Dengan demikian bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat didalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itulah sering dinyatakan bahwa pendidikan telah ada sepanjang peradaban manusia. Sehingga menurut Muchin "pendidikan adalah usaha sadar atau kegiatan yang direncanakan

dengan sengaja, agar teratur dan berencana dengan maksud merubah tingkah laku manusia yang diinginkan untuk melestarikan hidupnya" (1993:4)

Untuk pengertian pendidikan yang lain menurut **Cooms** yang diikuti oleh **Sumardi** dkk (1982) bahwa pendidikan dapat dibedakan menjadi pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal (1982:305). Sedangkan menurut **Ledge** menyatakan "pendidikan merupakan pengalaman yang diperoleh di bangku sekolah sehingga mempunyai sifat yang formal"(1982:306).

Yang dimaksud pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan diluar sekolah oleh badan pemerintah atau swasta secara teratur dalam waktu relatif singkat dan lebih menekankan kepada kecakapan dan ketrampilan tertentu yang tidak mengikuti peraturan-peraturan yang ketat dan kaku seperti pada pendidikan formal. Pada pendidikan bentuk non-formal ini sifatnya lebih fleksibel dan mungkin lebih efektif untuk mengembangkan terdidik pada bidang kecakapan tertentu dalam waktu yang tidak begitu lama. Sedangkan pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan formal baik oleh pemerintah maupun pihak swasta yang diatur oleh suatu kurikulum yang sudah ditetapkan.

Dikatakan bahwa untuk mencapai pendidikan formal pada jenjang yang dapat meningkatkan pembangunan sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa, makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kemampuan wawasan berfikir semakin luas dan memberikan warna dan nilai status sosial yang tinggi pula (**BPS**, 1994:45).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi terhadap pandangan akan suatu perubahan. Masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi akan cenderung rasional dalam bertindak bila dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah apalagi tidak berpendidikan sama sekali. Oleh karena itu mereka yang berpendidikan tinggi dalam menghadapi gagasan baru atau inovasi akan lebih terbuka, dan pada akhirnya akan dengan sukarela berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan.

dari ketiga macam pendidikan yang disampaikan oleh **Cooms** seperti yang diuraikan diatas, pada penulisan skripsi kali ini penulis mempergunakan variabel pendidikan formal. Hal ini disebabkan pendidikan formal mempunyai kurikulum yang jelas yang disahkan oleh pemerintah.

#### 1.4.2 konsep Partisipasi (Y)

Partisipasi merupakan salah satu komponen dalam pembangunan. Partisipasi ikut menentukan keberhasilan pembangunan, karena tanpa adanya partisipasi pembangunan akan jauh dari tercapainya tujuan. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, oleh karena itu, kegiatan pembangunan erat kaitannya dengan usaha membangkitkan partisipasi masyarakat. Menurut **Mubyarto** dalam bukunya **Ndraha** mengatakan bahwa "partisipasi berarti kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi berarti pula keterlibatan seseorang pada bagian kegiatan bersama" (1990:102).

Partisipasi menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai obyek yang dikenai pembangunan tetapi juga sebagai subyek atau yang melakukan pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan, masyarakat ikut berperan aktif didalamnya. Partisipasi masyarakat ini mempunyai arti yang sangat penting bagi pembangunan, karena partisipasi ini ikut menentukan berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan.

Lebih jauh lagi menurut **Bryant dan White** membagi partisipasi menjadi dua macam yaitu:

1. Partisipasi dalam proses politik, yaitu keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan politik seperti pemberian hak suara dalam pemilihan, kampanye, dan sebagainya.

2. Partisipasi dalam proses administratif, yaitu keterlibatan masyarakat dalam kegiatan seperti perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan(1989:270).

Secara tradisional, partisipasi selama ini diidentifikasi dengan perilaku yang bersifat partisan atau politis seperti pemungutan suara, kampanye, kegiatan kelompok kepentingan dan lobbying. Kegiatan-kegiatan ini oleh **Nelson** dalam bukunya **Bryant dan White** disebut sebagai bentuk-bentuk partisipasi horisontal, yang dilibatkan secara kolektif dalam upaya untuk mempengaruhi keputusan-keputusan kebijakan. Arena kedua bagi partisipasi ialah yang oleh **Nelson** disebut sebagai partisipasi vertikal. Partisipasi vertikal ini mencakup segala kesempatan ketika anggota masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elit dan pejabat, dan hubungan itu bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Partisipasi dalam proses administratif yang merupakan jenis partisipasi yang kedua. Bentuknya barangkali kegiatan-kegiatan kelompok kepentingan untuk mengolah keputusan administratif, atau pertukaran tertentu antara patron dan klien, namun biasanya partisipasi jenis ini lebih luas cakupannya daripada partisipasi dalam bentuk-bentuk lainnya.

Dari kedua macam partisipasi diatas, dalam pembahasan skripsi kali ini penulis hanya mengambil jenis partisipasi dalam proses administratif. Hal ini dikarenakan sesuai dengan obyek penelitian yaitu program P2KP, dimana program ini bukan merupakan program politis atau program untuk kepentingan politis, melainkan program yang dikhususkan untuk masyarakat miskin diperkotaan yang sumber dananya berasal dari Bank Dunia.

**Bryant dan White** menambahkan bahwa:

“Partisipasi merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain, partisipasi berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan suatu proyek sehubungan dengan kehidupan masyarakat, partisipasi adalah kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan “(1989:268).

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi dapat dilihat dengan :

1. Sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain.
2. Perhatian mendalam terhadap hasil proyek.
3. Kesadaran memberikan kontribusi.

Sedangkan menurut Taliziduhu Ndraha berpendapat bahwa pada dasarnya partisipasi terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1. Keterlibatan mental dan emosional, yaitu apa yang akan dirasakan sehingga reaksinya adalah adanya suatu ide, gagasan, pendapat, usul-usul dan saran yang termuat dalam segi pengambilan keputusan
2. Kesiediaan untuk memberikan kontribusi, disini reaksinya adalah memberikan sumbangan yang dapat berupa uang, bahan/material, tenaga/jasa.
3. Kesiediaan untuk ikut bertanggung jawab atas pembangunan.

Lebih jauh menurut **Ndraha** menambahkan bahwa partisipasi dapat dilihat dalam prose-proses yaitu:

1. Partisipasi dalam / melalui kontak dengan pihak lain.
2. Partisipasi dalam memberikan tanggapan terhadap informasi.
3. Partisipasi dalam perencanaan.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional progam pembangunan.
5. Partisipasi terhadap hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan (1990:103)

Menurut **Draha** jika keenam bentuk partisipasi dikonstruksikan secara logis, ternyata setiap bentuk partisipasi merupakan sekuen proses pembangunan, suatu proyek pembangunan mulai dari bentuknya sebagai gagasan sampai bentuknya sebagai bangunan.

Partisipasi yang dilakukan sepanjang proses tersebut dinamakan partisipasi prosional, sedangkan partisipasi yang hanya dilakukan pada satu atau beberapa fase saja dinamakan partisipasi parsial. Jika konsep partisipasi masyarakat ini dikaitkan

dengan konsep kesadaran akan tanggung jawab terhadap (hasil) pembangunan, dapatlah dibuat sebagai hipotesis bahwa semakin profesional partisipasi masyarakat maka semakin besar rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan, dan demikian juga sebaliknya.

Konsep partisipasi mengandung makna yang sangat luas dan arti yang dalam. Dalam proses pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Sebagai masukan, partisipasi masyarakat dapat berfungsi dalam enam fase proses pembangunan, yaitu fase penerimaan informasi, fase pemberian tanggapan terhadap informasi, fase perencanaan pembangunan, fase pelaksanaan pembangunan, fase penerimaan kembali hasil pembangunan, dan fase penilaian pembangunan. Sebagai masukan, partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

Sebagai keluaran, partisipasi dapat digerakkan atau dibangun, di sini partisipasi berfungsi sebagai keluaran proses stimulasi atau motivasi berbagai upaya, seperti program P2KP, inpres bantuan desa, lomba desa, UDKP, BPD, KUD, dan lain sebagainya.

Dalam partisipasi masyarakat berlaku juga prinsip pertukaran dasar (basic exchange principles). Salah seorang pemuka teori pertukaran tersebut yaitu **Peter M. Blau** dalam bukunya **Taliziduhu Ndraha** berpendapat bahwa: "semakin banyak manfaat yang diduga akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan itu (1990:105)

Pada gilirannya, partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkan perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan.

Menurut **Johston** dan **Clark** mengatakan "Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat sekali. Kesiediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. Menurut beberapa sumber, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat

menumbuhkan kemampuan masyarakat tersebut" (1982:170). Partipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri ibarat dua sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dan perlu untuk dibedakan.

Ditambahkan oleh **Mubyarto** "Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri berkorelasi positif dengan kemampuannya untuk berpartisipasi dan juga dengan kemampuannya untuk meningkatkan taraf hidupnya sendiri" (1984:36).

Jadi partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan konsep yang mengandung makna yang amat luas dan arti yang dalam. Dapat disimpulkan partisipasi adalah kesediaan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan, baik partisipasi dalam bentuk menerima suatu program, ikut terlibat dan melaksanakan program pembangunan serta turut serta dalam mengevaluasi hasil program. Partisipasi masyarakat mempunyai makna kalau disertai dengan perasaan tanggung jawab dalam mengambil bagian dalam aktivitas, dalam hal ini terkandung pula pengertian adanya semacam hak dan kewajiban yang patut dihargai dalam rangkaian kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Seperti yang dijelaskan **Siagian** bahwa "pada hakekatnya partisipasi seluruh masyarakat (social participation) merupakan salah satu tugas dan kewajiban setiap anggota masyarakat" (1987:4).

Sementara itu menurut **Uphoff** dan **Cohen** (1979) membagi derajat partisipasi dalam empat macam, yaitu :

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan.
3. Partisipasi terhadap hasil pembangunan.
4. Partisipasi dalam evaluasi.

Semakin tinggi derajat partisipasi komunitas lokal maka mereka tidak saja terlibat dalam pembuatan keputusan tetapi sampai pada tahap evaluasi. Sehingga disini diharapkan bahwa program tersebut benar-benar merupakan inisiatif lokal dan bermanfaat bagi kelompok sasaran.

Dari beberapa konsep partisipasi para ahli seperti dijelaskan diatas, dalam penulisan skripsi kali ini penulis mempergunakan konsep empat derajat partisipasi yang dikemukakan oleh **Uphoff** dan **Cohen** hal ini disebabkan konsep tersebut sesuai dengan obyek yang akan dijadikan penelitian dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama proyek yang dilibatkan dari tahap pembuatan keputusan sampai dengan evaluasi.

#### 1.4.2.1 partisipasi dalam pembuatan keputusan

pengertian pengambilan keputusan menurut **Sumartopo** adalah :

"suatu proses pemilihan alternatif, baik itu berupa manusia, benda, atau tindakan untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan kebutuhan. Tindakan yang telah diputuskan juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya keadaan yang tidak diinginkan, ataupun memperkecil resiko kerugian yang harus ditanggung bila peristiwa yang sudah dicoba untuk dicegah tersebut terjadi juga"(2000:3).

Sedangkan menurut **Talizidu Ndraha** berpendapat "salah satu unsur partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional, yaitu tentang apa yang akan dirasakan, sehingga reaksinya adalah adanya ide, gagasan, pendapat, usul-usul dan saran yang termuat dalam segi pengambilan keputusan"(1990:102).

Pengambilan keputusan dalam progam P2KP dilakukan dalam wadah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Hal ini sesuai dengan tujuan keberadaan lembaga BKM yang tercantum dalam buku manual proyek P2KP yaitu "BKM merupakan wadah bagi proses pengambilan keputusan tertinggi ditingkat masyarakat, yang memiliki tugas dan misi menangani berbagai persoalan kehidupan masyarakat terutama persoalan yang berkaitan dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan diperkotaan".

BKM beranggotakan warga komunitas yang diakui komitmennya, seperti perwakilan warga RT/RW, perwakilan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), perwakilan organisasi sosial dan kemasyarakatan, kelompok perempuan (PKK), tokoh masyarakat, atau tokoh agama. Unsur daerah, misalnya anggota BPD dapat

berpartisipasi dalam BKM dalam kapasitas pribadi. Pimpinan BKM dipilih dari dan oleh anggotanya.

Pengambilan keputusan yang mengikat seluruh anggota BKM dilakukan melalui penyelenggaraan musyawarah tertinggi yang melibatkan seluruh anggota. Setiap anggota memiliki hak yang sama. Dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut KSM tertentu, maka anggota KSM itu gugur hak suaranya.

Partisipasi yang dapat dilihat pada fase pembuatan keputusan ini berdasarkan kedua pendapat ahli diatas adalah:

1. Kesiediaan untuk menghadiri musyawarah yang diadakan oleh BKM.
2. Keterlibatan dengan memberikan ide, gagasan dalam musyawarah tersebut.
3. Kesiediaan memberikan hak suara apabila dilakukan voting.

#### 1.4.2.2 Partisipasi dalam pelaksanaan

Menurut **Siagian** mendefinisikan pelaksanaan yaitu "pelaksanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode yang dilakukan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan"(1996:87). Dari pengertian tersebut maka dalam penelitian ini adalah merupakan usaha, cara, teknik dan metode dalam pembuatan jembatan didesa Sempu dan Tegal Arum.

Sementara itu **Taliziduhu Ndraha** menambahkan bahwa unsur partisipasi yang kedua adalah "kesediaan untuk memberikan kontribusi, disini reaksinya memberikan sumbangan yang dapat berupa uang, bahan / material, tenaga / jasa"(1990:102)

Diwilayah BKM kenanga, yang terdiri atas desa Sempu dan Tegal arum, KSM yang mendapatkan dana untuk pembangunan sarana / prasarana dasar lingkungan ada dua KSM. Proses pembangunan yang dilakukan oleh kedua KSM selama ini telah melibatkan partisipasi masyarakat baik berupa swadaya materi maupun non-materi.

Partisipasi yang dapat dilihat dalam pelaksanaan ini adalah:

1. Kesiediaan memberikan bantuan uang.
2. Kesiediaan memberikan bantuan barang.
3. Kesiediaan memberikan bantuan tenaga.

#### **1.4.2.3. partisipasi terhadap hasil pembangunan**

Unsur partisipasi yang ketiga menurut Ndraha adalah kesiediaan untuk bertanggung jawab atas hasil pembangunan. Disini bentuknya dapat berupa kesiediaan untuk memanfaatkan/mempergunakan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan tersebut.

hasil pembangunan diwilayah kerja BKM Kenanga dalam bidang sarana dan prasaran fisik adalah dua buah jembatan yang berlokasi di dusun Darungan dan dusun Tulen Agung. Proses pembangunan jembatan yang dilakukan didusun Darungan telah mencapai 100% dan telah diresmikan tanggal pada tanggal 04 April 2001. Sedangkan untuk pembangunan jembatan didusun Tulen Agung saat ini baru mencapai sekitar 65%.

Partisipasi yang dapat dilihat terhadap hasil pembangunan ini adalah:

1. Kesiediaan mempergunakan hasil pembangunan
2. Kesiediaan memelihara hasil pembangunan.
3. Kesiediaan mengembangkan hasil pembangunan.

#### **1.4.2.3 partisipasi dalam evaluasi**

Menurut Bryant dan white "evaluasi adalah upaya mendokumentasikan apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Idealnya suatu proyek dirancang untuk menentukan hubungan sebab akibat itu, dan dengan demikian pemikiran kedepan mengenai evaluasi menjadi aspek integral dari rancangan semula"(1989:194). Dalam hal ini, yang dimaksud "apa yang terjadi" adalah berupa pembangunan jembatan dan mengapa jembatan tersebut dibangun.

**Charles O. Jones** menambahkan bahwa "evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program"(1996:357). Dari kedua pendapat ahli diatas maka penulis mencoba untuk melihat partisipasi dalam fase evaluasi dengan cara:

1. pengetahuan tentang apa yang dilakukan dalam pembangunan sarana dan prasarana diwilayah BKM kenanga.
2. Pengetahuan mengapa pembangunan itu dilakukan
3. Apa manfaat dari pembangunan itu

### 3.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atas permasalahan dalam penelitian. Dengan kata lain merupakan jawaban yang mendahului kenyataan. Menurut **Marzuki** mengemukakan bahwa "Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah. Dia akan ditolak jika salah satu palsu, dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya"(1989:35).

Selanjutnya **Effendi** (1988:22) mengatakan :

Hipotesis yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu:

1. Hipotesis harus menggambarkan hubungan antara variabel-variabel.
2. Hipotesis harus memberikan petunjuk bagaimana pengujian tersebut.

Disamping pendapat diatas, **Bong and Gall** dalam bukunya **Arikunto** mengemukakan adanya persyaratan dalam merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis harus dirumuskan dengan singkat dan jelas.
2. Hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih
3. Hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan (1992:65)

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis adalah suatu anggapan sementara mengenai hubungan antara dua varibel atau lebih yang dianggap benar dan kemudian diadakan pengujian tentang kebenarannya dengan menggunakan

analisis dan empiris. Suatu rumusan hipotesis hendaklah dapat menggambarkan fenomena tertentu.

Selanjutnya **Koentjoroningrat** (1986:24) menyatakan tentang kegunaan hipotesis dalam suatu penelitian sebagai berikut:

1. Memberi tujuan yang jelas pada penelitian.
2. Membantu dalam penentuan yang harus ditempuh dalam pembahasan ruang lingkup penelitian dengan memilih fakta-fakta yang menjadi pokok perhatian dan menentukan faktor-faktor yang relevan.
3. Menghindari suatu penelitian yang tidak terarah dan tidak bertujuan mengumpulkan data yang tidak berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Berdasarkan uraian dan kerangka teoritis yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Hipotesis Null ( $H_0$ )

“Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tidak akan mempengaruhi terhadap besar kecilnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan progam pembangunan”.

#### 4. Hipotesis Kerja ( $H_a$ )

“Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi terhadap besar kecilnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan progam pembangunan”.

### 1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk lebih memudahkan bagi peneliti untuk melakukan pengukuran dari masing-masing varibel melalui indikator-indikatornya. Menurut **Singarimbun dan Effendi** pengertian definisi operasional sebagai berikut “Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberikan pengetahuan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi

operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel”(1989:46).

Dengan demikian konsep harus diubah dulu kedalam bentuk yang dapat diukur secara empiris, dengan kata lain konsep harus diubah menjadi definisi operasional.

Berkaitan dengan hal tersebut **Tan** dalam bukunya **Koentjoro Ningrat** (1991:23) mengemukakan: “Definisi operasional tak lain ialah mengubah konsep-konsep yang berupa construct itu dengan kata-kata yang menggambarkan prilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain”. Jadi yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjabaran konsep-konsep yang telah ditentukan sebagai variabel kedalam pengertian yang lebih kongkret dan dapat diukur. Untuk mengukur variabel kedalam penelitian, digunakan indikator-indikator dari variabel yang bersangkutan.

Dalam penulisan skripsi ini operasionalisasi variabel meliputi:

1. Tingkat pendidikan ( variabel X )
2. Partisipasi masyarakat ( variabel Y )

### 1.6.1 Operasionalisasi variabel pengaruh tingkat pendidikan (variabel X)

Sebagai mana telah dijelaskan pada konsepsi dasar diatas bahwa variabel pengaruh yaitu:

#### 1.6.1.1 Tingkat pendidikan

Dalam upaya perluasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh warga negara Indonesia, pemerintah pada awal PELITA VI (1994 / 1995) tepatnya pada peringatan hari pendidikan nasional 2 mei 1994, mencanangkan progam wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ( wajib belajar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat pertama). Progam yang perintisannya dilaksanakan selama periode PELITA V tersebut pada prinsipnya merupakan pengembangan dan sekaligus kelanjutan dari progam wajib belajar 6 tahun yang telah dicanangkan pada pelita III.

Berdasarkan keputusan pemerintah tersebut maka penulis mengkriterikan tingkat pendidikan sebagai berikut, yaitu pendidikan rendah apabila tamat/tidak tamat SLTP, pendidikan sedang apabila tamat/tidak tamat SLTA, sedangkan pendidikan tinggi adalah apabila tamat/tidak tamat perguruan tinggi.

Pendidikan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pendidikan formal yang pernah diikuti oleh responden. Untuk pendidikan formal responden berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis, ternyata pendidikan tertinggi responden adalah tamat SLTA. Oleh sebab itu maka penulis kriterikan tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Rendah, apabila responden berpendidikan antara kelas 1 sampai kelas 9.
2. Tinggi, apabila responden berpendidikan antara kelas 10 sampai kelas 12.

#### **1.6.2 Operasionalisasi Variabel terpengaruh partisipasi masyarakat (variabel Y).**

##### **1.6.2.1 Partisipasi dalam pembuatan keputusan**

Gejala-gejala yang dapat diukur dari indikator ini adalah:

1. Kediaan menghadiri musyawarah atau pertemuan.
2. Keterlibatan dengan memberikan ide, gagasan dalam musyawarah tersebut.
3. Kesiediaan memberikan hak suara apabila dilakukan voting (pemilihan alternatif).

##### **1.6.2.2 Partisipasi dalam pelaksanaan.**

Gejala-gejala yang dapat diukur dalam pelaksanaan ini adalah:

1. Kesiediaan memberikan bantuan uang.
2. Kesiediaan memberikan bantuan barang.
3. Kesiediaan memberikan bantuan tenaga.

##### **1.6.2.3 Partisipasi terhadap hasil pembangunan**

Gejala-gejala yang dapat dilihat untuk mengukur indikator ini adalah:

1. Kesiediaan untuk memanfaatkan atau mempergunakan hasil pembangunan.

2. Ketersediaan memelihara hasil pembangunan
3. Ketersediaan mengembangkan hasil pembangunan.

#### 1.6.2.4 Partisipasi dalam evaluasi

Gejala yang dapat dilihat untuk mengukur indikator ini adalah:

1. Pengetahuan tentang apa yang dilakukan dalam pembangunan sarana dan prasarana di wilayah BKM kenanga.
2. Pengetahuan tentang mengapa pembangunan itu dilaksanakan.
3. Apa manfaat dari pembangunan itu.

### 1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dari suatu penelitian ilmiah, dimana metode ini digunakan sebagai landasan bergerak dalam mendapatkan data-data yang obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga suatu penelitian ilmiah mempunyai kebenaran yang dapat dibuktikan dengan kenyataan dilapangan. Sehubungan dengan hal ini **Kuntjoroningrat** mengemukakan pendapatnya sebagai berikut “metode adalah cara atau jalan, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk memahami obyek menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan”(1991:7).

Sedangkan penelitian menurut pendapat yang dikemukakan oleh **Sutrisno Hadi** adalah “sebagai suatu usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian usaha mana yang dilakukan dengan metode-metode ilmiah” (1989:4). Dengan demikian metode ilmiah merupakan suatu alat atau cara kerja memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian yang disesuaikan dengan ilmu-ilmu yang bersangkutan. Selanjutnya dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. penentuan populasi
2. metode penentuan sampel
3. metode pengumpulan data

#### 4. metode analisa data

##### 1.7.1 Penentuan populasi

Sebelum mengadakan penelitian, terlebih dahulu peneliti menentukan populasi yang akan diteliti. Menurut **Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi** maksudkan dengan populasi adalah sebagai berikut “populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga”(1989:152).

Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan individu yang menjadi obyek penelitian, dapat berupa manusia, barang atau benda lain yang hendak diteliti. Sehubungan dengan penelitian yang penulis adakan, maka penulis menetapkan populasi penelitiannya adalah seluruh masyarakat anggota BKM Kenanga desa Sempu dan Tegalarum yang berjumlah 474 orang yang terdiri dari 72 KSM.

##### 1.7.2 Metode Penentuan Sampel

Dalam suatu penelitian, disamping kita harus menentukan populasi, kita juga dituntut untuk dapat menentukan sampel, oleh karena tidak seluruh jumlah individu dalam populasi diperlukan untuk diteliti. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar penelitian yang dilakukan tidak memakan biaya dan waktu yang banyak. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh **Surachmad** yang mengemukakan sebagai berikut

“karena tidak mungkin penyelidikan selalu langsung menyelidiki segenap populasi padahal tujuan penelitian adalah untuk menemukan generalisasi yang dapat berlangsung secara umum. Karena seringkali penyelidikan terpaksa menggunakan sebagian saja dari populasi yakni sejumlah sampel yang dipandang representatif terhadap penelitian kita”(1985:93).

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa metode pengambilan sampel ini diharapkan dapat memberikan gambaran dari keseluruhan individu yang sedang diteliti. Adapun pengertian sampel itu sendiri menurut **Suryadi** adalah sebagai berikut “sampel adalah bagian populasi yang dapat diwakili atau dapat

merupakan contoh dari populasi yang dikenai penelitian” (1977:2). Sedangkan menurut **Singarimbun dan Effendi** untuk menentukan besarnya sampel dalam penelitian yaitu dengan memperhatikan empat faktor sebagai berikut :

1. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi
2. Dapat memberikan presisi dari hasil penelitian dengan menentukan standard dari taksiran yang diperoleh
3. Sederhana, hingga mudah dilakukan
4. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya”(1989:106).

Ditegaskan pula oleh **Soetrisno Hadi** bahwa

”sebenarnya tidaklah ada suatu ketetapan yang mutlak berapa persen suatu sampel harus diambil dari suatu populasi. Ketiadaan ketetapan yang mutlak ini tidak perlu menimbulkan keragu-raguan pada seorang penyelidik”(1989:73).

Dalam penelitian ini populasi mempunyai jumlah yang cukup banyak / besar, maka tehnik pengambilan sampelnya adalah dengan cara menentukan secara proposional sampling. Proposional sampling menurut **Soetrisno Hadi** adalah “mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan memperhitungkan besar kecilnya sub-sub populasi”(1989:122).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proposional random sampling dapat diartikan sebagai tehnik pengambilan sampel dari tiap-tiap sub populasi secara random atau tanpa pandang bulu dengan mamperhitungkan besar kecilnya sub populasi. Ditegaskan lagi oleh **Soetrisno Hadi** bahwa “dalam proposional random sampling ini besar kecilnya sampel mengikuti perbandingan (proporsi) besar kecilnya sub populasi”(1984:82).

Dalam penulisan ini, sampel yang penulis tetapkan adalah 72 orang, hal ini disesuaikan dengan jumlah KSM yaitu sebanyak 72 KSM, sehingga tiap KSM diambil 1(satu) orang sebagai responden.

### 1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan keterangan-keterangan dan data-data yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akurat maka digunakan tehnik-tehnik yang tepat. Data dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, kuisisioner dan sebagainya. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan, yang biasanya untuk melengkapi data primer. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Interview
2. Metode Dokumentasi
3. Metode Keusioner

#### 1.7.3.1 Metode Interview

Interview atau wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden, sehingga interview ini melibatkan dua pihak yaitu pihak penanya dan satu pihak lagi sebagai responden. Berkaitan dengan interview ini **Irawati Singarimbun** mengemukakan pendapatnya sebagai berikut “wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden”(Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1989:192). Dari pengertian ini maka tugas peneliti adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencatat hasil dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden.

#### 1.7.3.2 Metode Dokumentasi

Yang dimaksud tehnik dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan cara menggali data-data, dokumen-dokumen serta surat-surat penting yang ada dilokasi tempat penelitian. Berkaitan dengan hal ini **Koentjoroningrat** mengemukakan pendapatnya sebagai berikut “pada umumnya data yang tercantum

dalam berbagai jenis dokumen itu merupakan satu-satunya alat untuk mempelajari permasalahan tertentu, antara lain karena tidak dapat diobservasi lagi dan tidak dapat diingat lagi”(1991:66). Sehingga data yang diperoleh dari tehnik dokumentasi ini berupa data yang dijadikan sebagai pelengkap dari data primer.

### 1.7.3.3 Metode Kuisisioner

Kuisisioner merupakan serangkaian pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian yang diberikan kepada responden dengan tujuan untuk dijawab. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh **Koentjoroningrat** yaitu

“adalah suatu daftar yang berisikan suatu rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal dalam satu bidang. Dengan demikian kuisisioner dimaksudkan sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari responden”(1991:88).

Dalam penulisan ini penulis menggunakan tipe kuisisioner tertutup. Kuisisioner tertutup adalah bahwa responden tidak mempunyai kesempatan lain dalam memberikan jawabannya selain jawaban yang telah disediakan didalam daftar pertanyaan tersebut. Bentuk demikian responden tinggal memilih dari jawaban-jawaban yang sudah disajikan.

### 1.7.4 Metode Analisa Data

Data-data yang diperoleh melalui tehnik-tehnik data tersebut diatas selanjutnya perlu dianalisa untuk memperoleh kesimpulan guna membuktikan hipotesis yang diajukan. Apakah hipotesis kerja yang diajukan diterima atau ditolak, dan sekaligus akan dapat ditarik kesimpulan.

Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa data secara statistik, hal ini sebagai mana yang diungkapkan oleh **Soetrisno Hadi** bahwa “metode statistik adalah cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan menganalisa data penyelidikan yang berwujud angka-angka”(1986:221).



## BAB II

### DESKRIPSI UMUM PROGAM P2KP

#### 2.1 Latar belakang

Program penanggulangan kemiskinan yang dimulai sejak Pelita pertama sudah menjangkau seluruh pelosok tanah air. Upaya itu telah menghasilkan perkembangan yang positif. Namun demikian, krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah mengecilkan arti berbagai pencapaian pembangunan tersebut..

Krisis tersebut pada satu sisi telah menimbulkan lonjakan pengangguran dan dengan cepat meningkatkan kemiskinan diperkotaan dan pedesaan. Karena itu, krisis juga telah menyadarkan kita bahwa pendekatan yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan perlu dikoreksi atau diperkaya dengan upaya untuk mengokohkan keberdayaan institusi komunitas agar pada masa berikutnya upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu, dibutuhkan suatu program penanggulangan kemiskinan yang mampu memperluas prospek dan pilihan untuk dapat hidup dan berkembang dimasa depan, khususnya bagi masyarakat miskin diperkotaan. Program tersebut diperlukan untuk mendukung lebih lanjut program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan seperti IDT ( Inpres Desa Tertinggal ) atau yang baru berjalan seperti PPK ( Program Pengembangan Kecamatan ) yang sasarannya dipedesaan.

Program yang akan dilaksanakan diperkotaan ini menganut pendekatan pemberdayaan (empowerment) sebagai suatu syarat menuju pembangunan yang berkelanjutan ( sustainable development ).

## 2.2 Tujuan

P2KP bertujuan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui hal-hal berikut, yaitu :

1. Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru.
2. Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang butir 1 diatas.
3. Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok.
4. Penyiapan, pengembangan, dan pemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.
5. Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan, melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan.

## 2.3 Strategi program P2KP

P2KP memadukan beberapa strategi yang pernah diterapkan pada program-program penanggulangan kemiskinan terdahulu, khususnya yang diselenggarakan diperkotaan. Adapun P2KP dilaksanakan melalui strategi-strategi sebagai berikut:

1. penyelenggaraan konsep Tribina (bina sosial, bina ekonomi dan bina lingkungan).
2. Pemberian dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan, serta pinjaman dana bergulir untuk modal kerja kegiatan produktif.
3. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat membuka peluang usaha baru.

- 4. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat agar inisiatif mereka dapat ditumbuhkan dan diwujudkan.
- 5. Pendampingan pada KSM (kelompok swadaya masyarakat).

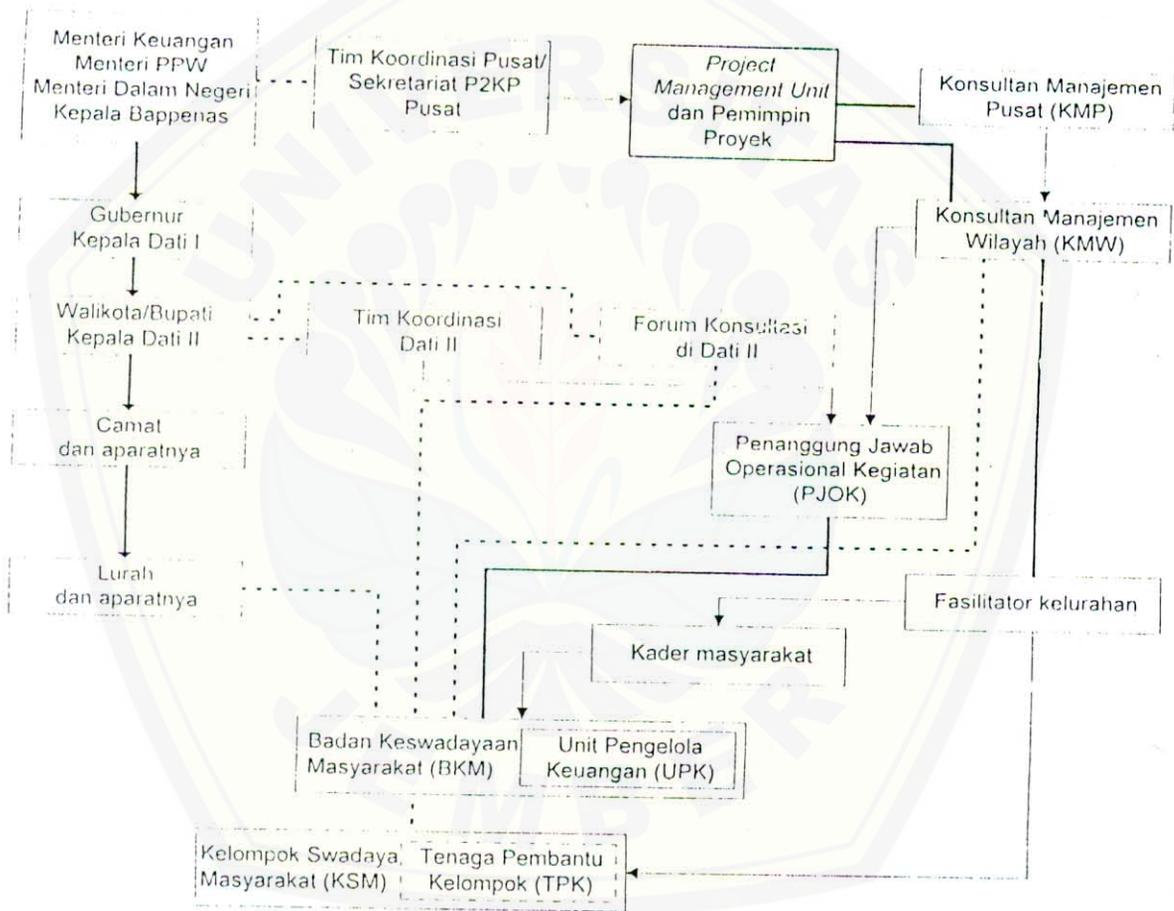
**2.4 Struktur organisasi P2KP**

Dalam pelaksanaan P2KP, dibentuk tim koordinasi pada beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut:

- 1. Di tingkat pusat dibentuk tim koordinasi P2KP pusat yang terdiri atas unsur-unsur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Departemen Keuangan (Depkeu), Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah, dan departemen lainnya yang terkait.
- 2. Untuk keperluan operasional dan administrasi, tim koordinasi P2KP pusat membawahkan sekretariat P2KP pusat yang terdiri atas unsur-unsur departemen terkait.
- 3. Pengelolaan proyek dilakukan oleh Project Management Unit (PMU), yang dibentuk di Instansi pelaksana, yaitu Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah. Untuk administrasi proyek, PMU dibantu oleh pemimpin proyek. Untuk membantu koordinasi dan pengelolaan P2KP pada tingkat pusat, dipilih lembaga konsultan melalui lelang terbuka, yang disebut sebagai Konsultan Manajemen Pusat (KMP).
- 4. Pada tingkat wilayah, ditempatkan KMW yang masing-masing menangani satu SWK. KMW pun direkrut melalui suatu proses lelang terbuka. KMP dan KMW terikat secara kontraktual dengan pemimpin proyek.
- 5. Pada tingkat kelurahan, dikembangkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang merupakan kelembagaan masyarakat yang beranggotakan tokoh masyarakat, perwakilan KSM, dan warga kelurahan. BKM selanjutnya membentuk UPK (Unit Pengelola Keuangan) yang diketuai oleh bendahara BKM.
- 6. Penerima bantuan adalah kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau kelompok usaha bersama (Kube) yang terdiri atas perorangan dan atau keluarga miskin.

7. Untuk membantu, mendorong dan mengarahkan kegiatan KSM dikelurahan sasaran, disiapkan sejumlah pendamping yang disebut sebagai Fasilitator Kelurahan. Fasilitator kelurahan adalah perangkat KMW yang melakukan pendampingan baik kepada KSM maupun pada institusi setempat seperti BKM.

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Pelaksanaan P2KP



UPK adalah bagian dari BKM, TPK adalah bagian dari KSM

## 2.5 Penetapan lokasi penerima bantuan

Penerima bantuan P2KP adalah perorangan dan keluarga miskin yang berada di satuan wilayah administrasi kelurahan atau desa perkotaan yang tersebar diseluruh wilayah perkotaan di Indonesia. Dalam P2KP, kedua status wilayah administrasi pemerintah kota tersebut selanjutnya akan diistilahkan sebagai kelurahan. Adapun penentuan status perkotaan yaitu:

1. kelurahan dan desa perkotaan, status perkotaan sebuah wilayah kelurahan dan desa perkotaan diperoleh dari data BPS (biro pusat statistik) yang telah diolah. Data status perkotaan tersebut merupakan olahan dari berbagai data, yaitu data desa tertinggal, profil desa, propinsi dalam angka, potensi desa, dan data susenas 1995.
2. Kecamatan perkotaan, kriteria kecamatan perkotaan ditentukan oleh jumlah kelurahan/desa perkotaan yang berada dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan kecamatan. Bila terdapat separuh atau lebih kelurahan/desa perkotaan di dalam sebuah kecamatan, maka kecamatan itu dikategorikan sebagai kecamatan perkotaan.
3. Daerah tingkat II perkotaan, bila terdapat separuh atau lebih kecamatan perkotaan di dalam sebuah wilayah administrasi pemerintahan daerah tingkat II, maka daerah itu dikategorikan sebagai Dati II perkotaan. Dati II yang selama ini memang sudah berstatus kota, secara otomatis berstatus Dati II perkotaan.

### 2.5.1 penetapan di Tingkat Pusat

penetapan lokasi penerima bantuan di tingkat pusat merupakan upaya untuk memperoleh angka perkiraan jumlah kelurahan yang diikutsertakan dalam pelaksanaan P2KP, hal ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Data BPS diolah dan diseleksi berdasarkan status perkotaannya. Termasuk didalamnya adalah melakukan penetapan status perkotaan seperti yang dinyatakan diatas.

2. Dari proses tersebut diperoleh nama-nama Dati II beserta nama dan jumlah kecamatan serta kelurahan di dalamnya.
3. Tiga atau lebih Dati II yang berdekatan kemudian dikelompokkan menjadi satu satuan wilayah kerja (SWK). Setiap SWK dikelola oleh satu konsultan manajemen wilayah (KMW)
4. Data hasil olahan dalam bentuk daftar kelurahan per wilayah administrasi yang dicalonkan menerima bantuan P2KP, disampaikan kepada masing-masing Pemda tingkat I maupun tingkat II untuk mendapatkan umpan balik.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, sejumlah Dati II yang dijadikan lokasi sasaran P2KP kemudian dikelompokkan kedalam beberapa SWK. Pengelompokan SWK dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. keterpaduan dengan kawasan pengembangan daerah.
- b. Jangkauan geografis agar memudahkan koordinasi.

Adapun untuk propinsi Jawa Timur terdiri dari dua SWK, yaitu SWK VIII dan SWK IX. Yang terdiri dari yaitu:

1. SWK VIII, terdiri dari pemerintah Dati II:
  - a. Kabupaten Sidoarjo
  - b. Kabupaten Mojokerto
  - c. Kota Mojokerto
  - d. Kabupaten Bojonegoro
  - e. Kabupaten Tuban
  - f. Kabupaten Lamongan
  - g. Kabupaten Gresik
  - h. Kota Surabaya
2. SWK IX, terdiri dari pemerintah Dati II :
  - a. Kabupaten Banyuwangi
  - b. Kabupaten Bondowoso
  - c. Kabupaten Situbondo

- d. Kabupaten Probolinggo
- e. Kota Probolinggo
- f. Kabupaten Pasuruan
- g. Kota Pasuruan
- h. Kabupaten Malang
- i. Kota Malang

## 2.6 P2KP Banyuwangi

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa kabupaten Banyuwangi termasuk kedalam SWK (satuan wilayah kerja) IX. Adapun unsur yang terdapat pada Dati II dalam pelaksanaan P2KP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pemda tingkat II (kepala daerah, Bappeda tingkat II, dan dinas-dinas terkait). Peran pokok mereka adalah memperhatikan dan menjaga kelancaran pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya. Tugas utama tim itu adalah sebagai berikut:
  - a. memberikan legitimasi dan dukungan kepada para pelaku sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang digariskan dalam P2KP di wilayah kerjanya.
  - b. Mengoreksi daftar kecamatan dan kelurahan miskin yang berdasarkan pertimbangan daerah mempunyai arti strategis untuk dicalonkan sebagai penerima bantuan P2KP, kemudian mengirimkan koreksi tersebut kesekretariat P2KP Pusat, dengan tembusan ke Bappeda tingkat I.
  - c. Melakukan pemasyarakatan progam kepada aparat di kecamatan.
  - d. Membantu pelaksanaan P2KP pada wilayah kecamatan, bila diperlukan.
  - e. Membantu merealisasikan forum konsultasi penanggulangan kemiskinan di perkotaan.
  - f. Melakukan monitoring kegiatan pelaksanaan progam dengan menerima laporan tahunan dari kecamatan.
2. Unsur konsultan pada daerah tingkat II, yaitu tim dari KMW. Mengingat cakupan wilayah kerja KMW cukup luas (mencakup beberapa Dati II), mereka dianjurkan

untuk menempatkan satuan tugas, atau beberapa sub satuan tugas pada masing-masing sub SWK.

Dari 17 jumlah kecamatan di kabupaten Banyuwangi, ternyata semua kecamatan tersebut merupakan sasaran dari proyek P2KP. Salah satunya adalah dikecamatan Sempu. Di kecamatan Sempu terdapat 3 kelurahan yang mendapat bantuan P2KP yaitu kelurahan Gendoh, Sempu dan Temu guruh. Pada penulisan skripsi ini penulis mengambil desa Sempu sebagai obyek penelitian.

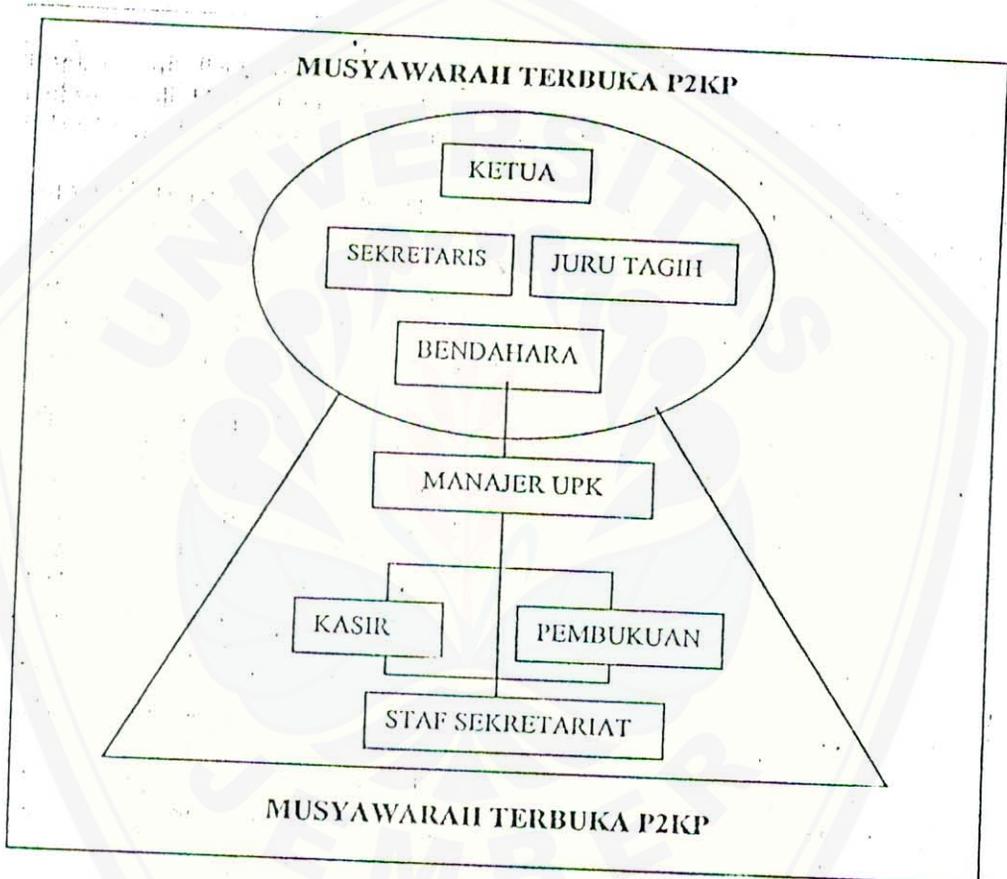
Proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) adalah program penanggulangan kemiskinan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan kelembagaan komunitas lokal. Dengan kata lain yang ingin diberdayakan adalah masyarakat atau lebih tepat kelembagaan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dipersilahkan untuk memilih atau membentuk sendiri lembaga komunitasnya. Kelembagaan komunitas yang dipilih oleh masyarakat disebut Badan keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM sebagai lembaga yang dipilih dan dibentuk sendiri oleh masyarakat adalah lembaga yang diberi kepercayaan untuk mengelola dan mengembangkan aset masyarakat, yaitu dana P2KP.

Pendirian BKM di desa Sempu dan Tegalarum berdasarkan musyawarah warga pada tanggal 08-03-2000 bertempat di balai desa Sempu. Musyawarah tersebut dihadiri oleh segenap komponen masyarakat yang terdiri atas perwakilan RT, RW, tokoh masyarakat, perangkat desa dan organisasi kemasyarakatan lainnya. selanjutnya BKM tersebut diberi nama BKM Kenanga.

Perlu dijelaskan bahwa pada awal pembentukan/pendirian BKM kenanga, desa Sempu belum terpecah. Pada perjalanannya kemudian desa Sempu mengalami pemekaran wilayah menjadi dua desa yaitu desa Sempu dan Tegal Arum. Desa Sempu terdiri dari dusun Krajan dan Tugung, sedangkan desa Tegalarum terdiri dari dusun Darungan dan Tegalyasan. Sehingga disini wilayah operasional BKM Kenanga terdiri dari dua desa.

Struktur organisasi di BKM kenanga berdasarkan hasil pembentukan awal dan masih berlaku sampai sekarang dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 3  
Struktur organisasi dan Personalia BKM Kenanga



\*sumber laporan tutup buku BKM Kenanga tahun 2000/2001

## Keterangan:

## BKM

1. Ketua : Tawa Adi Partawa
  2. Sekretaris : Haris Kunaifi
  3. Bendahara : Titin Susiani
  4. Juru Tagih : H. Achmad Fauzi
- Suharno  
Winarso Y.S  
Abdus Salam  
Kundari F.  
Slamet Susanto  
Sudirman  
Waristu

## UPK

1. Manajer : Titin Susiani
2. Kasir : Waristu
3. Pembukuan : Sulastri
4. Staf Sekretariat : Busaeri

Bentuk struktur organisasi seperti diatas merupakan skema dasar pelaksanaan dari prinsip P2KP. Seperti kita ketahui dalam P2KP proses pengambilan keputusan bersama merupakan elemen yang sangat penting. Untuk itu, model kelembagaan yang diterapkan dalam BKM bukan bersifat hirarkis, namun bersifat matriks.

Struktur BKM menganut sistem matriks didasarkan pada: pertama, BKM bukanlah pengambil keputusan tertinggi, maka fungsi ketua BKM hanyalah terbatas pada fungsi administratif saja. Kedua, sifat hubungan antara pengurus dan anggota BKM bersifat kolegial. Jadi kepemimpinan di BKM adalah kolektif kolegial. Ketiga, struktur matriks dimaksudkan untuk menghindari bertumpuknya kekuasaan pada seorang ketua yang akan bisa menimbulkan banyak persoalan dibelakang hari. Dari

struktur tersebut maka pengurus BKM (ketua, sekretaris, dll) secara bersama-sama bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat melalui sebuah forum musyawarah yang bersifat terbuka.

Sedangkan unit pengelola keuangan (UPK) adalah sebuah gugus tugas dari BKM. Maka sifat kelembagaan di UPK adalah hirarkis. Dimana seorang kasir dan bagian pembukuan bertanggung jawab pada manajer UPK. Sedangkan UPK sendiri bertanggung jawab kepada BKM.

Penyerapan dana P2KP untuk desa Sempu dan Tegalarum bisa dikatakan berimbang bila dikaitkan dengan perbandingan jumlah penduduk di kedua wilayah tersebut, yaitu:

- Jumlah penduduk Sempu:  $\frac{5843}{12076} = 48,39\%$
- Jumlah penduduk tegalarum :  $\frac{6233}{12076} = 51,61\%$
- Penyerapan dana P2KP Sempu:  $\frac{159225000}{336725000} = 47,29\%$
- Penyerapan dana P2KP Tegalarum:  $\frac{177500000}{336725000} = 52,71\%$

Seperti dijelaskan diatas bahwa P2KP tidak hanya memberikan dana untuk usaha modal produktif tetapi juga dana untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan. Di wilayah BKM Kenanga yang mendapatkan dana untuk pembangunan sarana / prasarana dasar lingkungan ada 2 KSM, yaitu KSM Budi santoso di dusun Darungan dan KSM Gawe Joyo di dusun Tulen Tugung. Proses pembangunan yang dilakukan oleh kedua KSM selama ini telah melibatkan partisipasi masyarakat baik berupa swadaya materi maupun non materi. secara administratif, pelaporan pembangunan secara berkala juga telah dilaporkan kepada

BKM maupun instansi terkait. Proses pembangunan jembatan di dusun Darungan yang dilakukan oleh KSM Budi Santoso telah mencapai 100% dan telah diresmikan pada tanggal 04 April 2001. Sedangkan untuk pembangunan jembatan di dusun Tulen Tugung yang dilaksanakan oleh KSM Gawe Joyo saat ini telah mencapai kurang lebih 65%. Berdasarkan neraca lajur BKM Kenanga per 30 Juni 2001, dapat dilihat bahwa dana hibah untuk pembangunan dua jembatan tersebut adalah: untuk jembatan dari KSM Gawejoyo Tulentugung sebesar Rp 19,760,000 dan untuk jembatan di KSM Budi Santoso Darungan sebesar Rp13,590,000. Dari besarnya dana tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dimana reaksinya adalah memberikan bantuan dalam bentuk uang, materi dll, bisa dikatakan kecil. Akan tetapi perlu diingat bahwa dalam tahap pengambilan keputusan, tingkat keterlibatan masyarakat sangat tinggi karena pembangunan jembatan itu sendiri adalah usulan dari masyarakat.



## BAB III

### Penyajian Data Variabel Penelitian

#### 3.1 Pengantar

Pada bab ini akan dibahas secara garis besar mengenai variabel-variabel dan berbagai indikator penelitian, disamping itu juga akan dipaparkan data-data primer yang berupa skor atau jawaban dari responden terhadap kuesioner yang diajukan oleh peneliti. Langkah ini merupakan kelanjutan dari langkah pengumpulan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Setelah peneliti mengadakan penelitian, maka data yang telah terkumpul tersebut harus disajikan secara teratur dan sistematis sesuai dengan urutan variabel penelitian yang ada, karena hal ini sangat membantu memudahkan dalam melakukan kegiatan analisis data.

Variabel merupakan unsur penelitian seperti yang disebutkan oleh **Singarimbun dan Efendi**, "Unsur lain yang biasa dikenal dengan unsur penelitian adalah variabel, yaitu konsep yang mempunyai variasi nilai-nilai" (1989:42).

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang mendasari kerangka analisis penelitian, yaitu :

1. Variabel Pengaruh (X), yaitu tingkat pendidikan formal masyarakat anggota BKM Kenanga Desa Sempu dan Desa Tegalarum Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.
2. Variabel Terpengaruh (Y), yaitu partisipasi masyarakat anggota BKM Kenanga dalam pembangunan fisik pada program P2KP.

#### 3.2 Variabel Tingkat Pendidikan Formal (X)

Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan formal, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, yang diatur dengan suatu kurikulum yang sudah ditetapkan. Pendidikan formal dapat menumbuhkembangkan seseorang sebagai makhluk individu melalui pembekalan dalam semua bidang studi. Melalui pembekalan materi bidang studi, seseorang

dikembangkan logika sesuai dengan jenis dan jenjangnya masing-masing, sehingga seseorang dapat berpikir nalar. Dengan berpikir nalar maka dapat memberikan kesadaran yang lebih tinggi dalam berwarga negara dan memudahkan bagi pengembangan identifikasi terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang bersifat nasional.

Dari pengertian diatas disebutkan bahwa pendidikan formal mempunyai jenjang dan kurikulum yang sudah ditetapkan. Maka pendidikan yang dimaksud disini adalah pendidikan formal yang pernah diikuti oleh responden, yang penulis kriteriakan sebagai berikut :

1. Pendidikan Rendah, apabila responden berpendidikan antara kelas 1 sampai dengan kelas 9.
2. Pendidikan Tinggi, apabila responden berpendidikan antara kelas 10 sampai dengan kelas 12.

Tabel 1  
Data jawaban responden terhadap indikator pendidikan formal

N	Tingkat Pendidikan Formal												Score	Kategori			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1						*										1	Rendah
2														*		2	Tinggi
3														*		2	Tinggi
4														*		2	Tinggi
5														*		2	Tinggi
6									*							1	Rendah
7									*							1	Rendah
8									*					*		2	Tinggi
9									*							1	Rendah
10														*		2	Tinggi
11														*		2	Tinggi
12										*				*		2	Tinggi
13														*		2	Tinggi
14														*		2	Tinggi
15								*								1	Rendah
16								*								1	Rendah
17														*		2	Tinggi
18								*								1	Rendah
19														*		2	Tinggi
20											*					2	Tinggi
21														*		2	Tinggi
22														*		2	Tinggi
23														*		2	Tinggi
24														*		2	Tinggi
25								*						*		2	Tinggi
26								*								1	Rendah
27								*								1	Rendah
28														*		2	Tinggi
29														*		2	Tinggi
30						*				*						2	Tinggi
31								*								1	Rendah
32																1	Rendah
33														*		2	Tinggi
34														*		2	Tinggi
35														*		2	Tinggi
36														*		2	Tinggi
37														*		2	Tinggi
38								*						*		2	Tinggi
39					*											1	Rendah
40																1	Rendah
41														*		2	Tinggi
42														*		2	Tinggi
43														*		2	Tinggi



Untuk selanjutnya variabel tingkat pendidikan formal dari anggota KSM Kenanga yang mempunyai dua kategori yaitu tinggi dan rendah. Untuk kategori tinggi apabila responden mempunyai skor 2 dan rendah apabila responden mempunyai skor 1.

Selanjutnya dari data berdasarkan skor diatas dapat dihitung dan dikelompokkan dalam tabel frekuensi seperti dibawah ini.

**Tabel 2**

**Distribusi frekuensi tingkat pendidikan formal**

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Tinggi	48	66,6%
Rendah	24	33,3%
Jumlah	72	100%

\*Sumber: skor jawaban kuisisioner tingkat pendidikan formal.

Data pada tabel 2 menunjukkan sebgaiian besar (66,6%) anggota kelompok masyarakat mempunyai tingkat pendidikan formal yang tinggi. Hal ini juga memmberi arti bahwa sebgaiian besar masyarakat anggota KSM Kenanga desa Sempu dan Tegalarum mempunyai tingkat pendidikan SMA atau sederajat.

### **3.3 Variabel Partisipasi Masyarakat.**

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan konsep yang mengandung makna yang sangat luas dan arti yang dalam. Dapat disimpulkan partisipasi adalah kesediaan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan, baik partisipasi dalam bentuk ikut terlibat mulai pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan, partisipasi terhadap hasil pembangunan, dan turut serta dalam mengevaluasi progam.

Menyimak pendapat diatas, maka dalam penulisan skripsi ini untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik dalam proyek P2KP di

wilayah BKM Kenanga di desa Sempu dan Tegalarum digunakan indikator sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan.
3. Partisipasi terhadap hasil pembangunan.
4. Partisipasi dalam evaluasi.

### 3.3.1 Partisipasi dalam pembuatan keputusan

Pembuatan keputusan dalam adalah suatu proses pemilihan alternatif, baik itu berupa manusia, benda, atau tindakan untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan bentuk partisipasi dalam pembuatan keputusan ini dengan adanya ide, gagasan, pendapat, usul-usul, dan saran.

Pengambilan keputusan dalam P2KP dilakukan dalam wadah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). BKM merupakan wadah bagi proses pengambilan keputusan tertinggi ditingkat masyarakat, yang memiliki tugas dan misi menangani berbagai persoalan kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan program P2KP. Adapun item-item yang digunakan untuk mengukur partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Kesiediaan untuk menghadiri musyawarah yang diadakan oleh BKM.
2. Keterlibatan dengan memberikan ide, gagasan dan pendapat dalam musyawarah tersebut.
3. Kesiediaan memberikan hak suara apabila dilakukan voting dalam musyawarah tersebut.

**Tabel 3**  
**Skor jawaban responden terhadap indikator partisipasi dalam pembuatan keputusan**

N	Item responden					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1	1	1	1	1	1	5
2	1	1	2	1	2	8
3	2	2	1	2	2	9
4	2	2	2	2	2	10
5	2	1	1	1	1	6
6	2	1	1	1	1	6
7	2	2	2	1	2	9
8	2	1	2	1	2	8
9	2	2	2	1	2	9
10	2	2	2	2	2	10
11	2	1	2	1	2	8
12	2	1	2	2	2	8
13	1	1	2	2	1	7
14	1	1	1	1	1	5
15	1	1	2	1	1	7
16	2	2	1	1	1	7
17	2	2	2	1	2	9
18	2	1	1	1	1	6
19	2	2	2	1	1	7
20	2	2	2	2	2	10
21	2	2	2	2	2	10
22	2	2	2	2	2	10
23	1	1	2	2	2	8
24	2	2	2	2	2	10
25	2	2	2	2	2	10
26	2	1	2	1	1	7
27	2	2	2	2	2	10
28	2	2	2	2	2	10
29	2	1	2	1	1	7
30	1	1	1	1	1	5
31	1	1	2	1	1	7
32	2	2	2	2	2	10
33	2	2	2	2	2	10
34	2	1	1	1	1	6
35	2	2	2	2	2	10
36	2	1	1	1	1	6
37	2	2	2	2	2	10
38	2	1	2	1	1	7
39	2	1	1	1	1	5
40	2	2	2	2	2	10
41	2	2	2	2	2	10
42	2	2	2	2	2	10

43	2	1	2	1	1	7
44	2	2	1	2	2	8
45	1	1	2	1	1	6
46	2	1	2	1	1	7
47	2	2	2	2	2	10
48	2	1	2	1	1	7
49	1	1	2	1	1	6
50	2	2	2	2	2	10
51	2	1	1	1	1	7
52	2	1	1	2	2	7
53	1	1	2	1	1	6
54	1	1	1	1	1	5
55	2	1	2	1	1	7
56	2	2	2	2	2	10
57	2	1	2	2	2	9
58	1	1	2	1	1	6
59	2	1	2	1	1	7
60	2	2	2	2	2	10
61	2	2	1	1	1	7
62	2	1	1	1	1	6
63	2	2	2	1	1	8
64	2	1	1	1	1	6
65	1	1	1	1	1	5
66	2	2	1	1	1	7
67	2	2	2	2	2	10
68	2	2	2	2	2	10
69	2	2	1	1	1	7
70	2	2	2	2	2	10
71	1	1	1	1	1	5
72	2	2	2	2	2	10

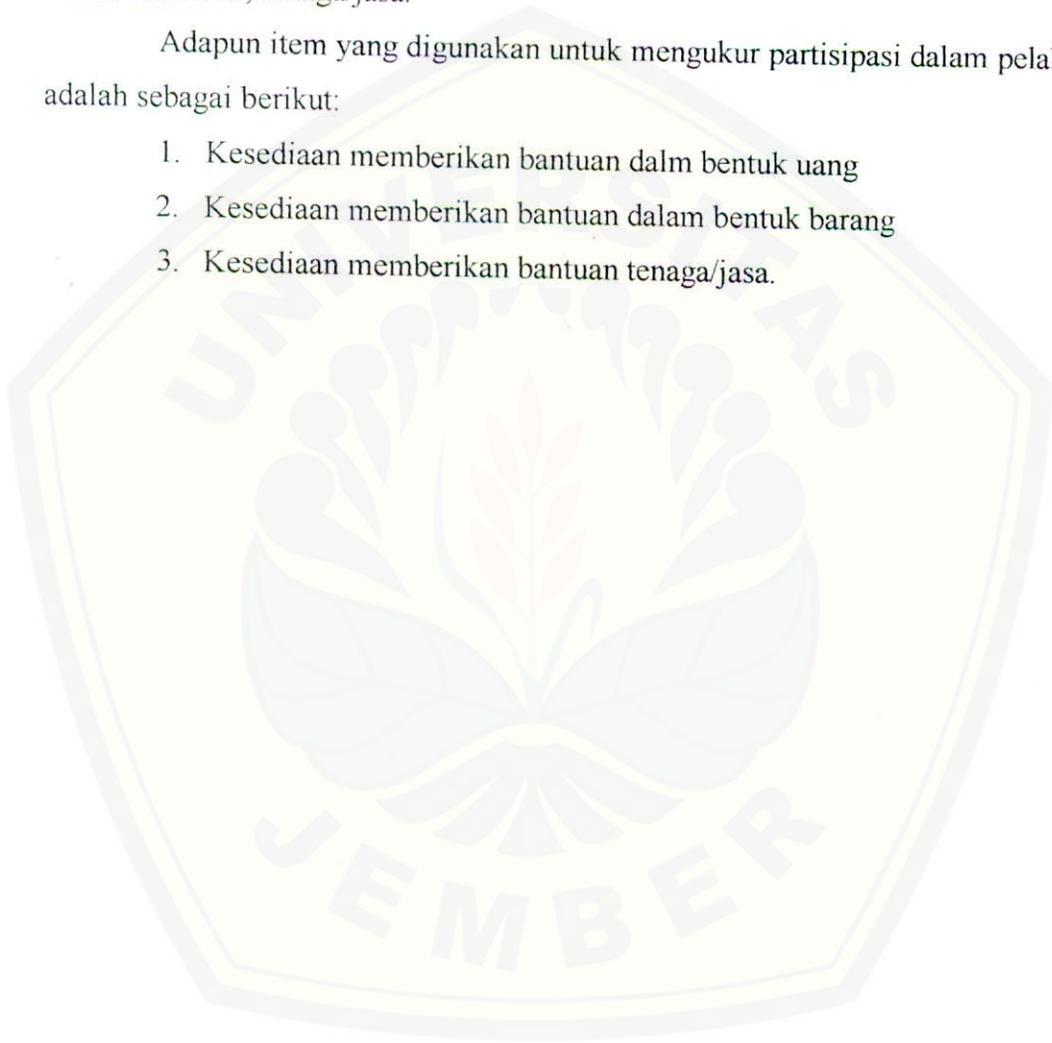
\*Sumber data primer

### 3.3.2 Partisipasi dalam pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan keseluruhan usaha, cara, tehnik dan metode yang dilakukan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu bentuk partisipasi dalam tahap pelaksanaan yaitu kesediaan untuk memberikan kontribusi yang reaksinya adalah dengan memberikan sumbangan yang dapat berupa uang, bahan /material, tenaga/jasa.

Adapun item yang digunakan untuk mengukur partisipasi dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Kesediaan memberikan bantuan dalam bentuk uang
2. Kesediaan memberikan bantuan dalam bentuk barang
3. Kesediaan memberikan bantuan tenaga/jasa.



Tabel 4

Jawaban responden terhadap indikator partisipasi dalam pelaksanaan

N	Item Responden			Jumlah
	1	2	3	
1	1	2	1	4
2	2	1	2	5
3	2	2	2	6
4	1	2	1	4
5	1	1	1	3
6	2	2	2	6
7	2	2	2	6
8	2	2	2	6
9	2	2	2	6
10	2	2	2	6
11	2	2	2	6
12	2	2	2	6
13	1	2	2	5
14	1	2	1	4
15	1	1	1	3
16	1	1	1	3
17	2	1	2	5
18	1	1	1	3
19	1	2	1	4
20	2	2	2	6
21	2	2	2	6
22	2	2	2	6
23	2	1	1	4
24	2	2	2	6
25	1	1	1	3
26	2	2	2	6
27	2	2	2	6
28	2	2	2	6
29	2	2	1	5
30	1	1	1	3
31	1	2	1	4
32	2	2	2	6
33	2	1	2	5
34	2	1	2	5
35	1	2	2	5
36	2	2	2	6
37	2	2	2	6
38	1	1	1	3
39	1	1	1	3
40	2	1	2	5
41	2	2	2	6
42	2	1	2	5
43	2	2	1	5
44	1	1	1	3

45	2	2	2	6
46	2	2	2	6
47	2	2	2	6
48	1	2	2	5
49	1	1	2	4
50	2	2	2	6
51	2	1	2	5
52	1	1	1	3
53	1	1	1	3
54	1	2	1	4
55	1	2	2	5
56	1	1	1	3
57	2	2	2	6
58	1	2	2	5
59	2	2	2	6
60	2	1	2	5
61	1	1	1	3
62	2	2	2	6
63	1	1	2	4
64	1	1	1	3
65	1	1	1	3
66	1	2	1	4
67	1	1	2	4
68	2	2	2	6
69	1	1	1	3
70	1	2	2	5
71	1	1	1	3
72	2	2	2	6

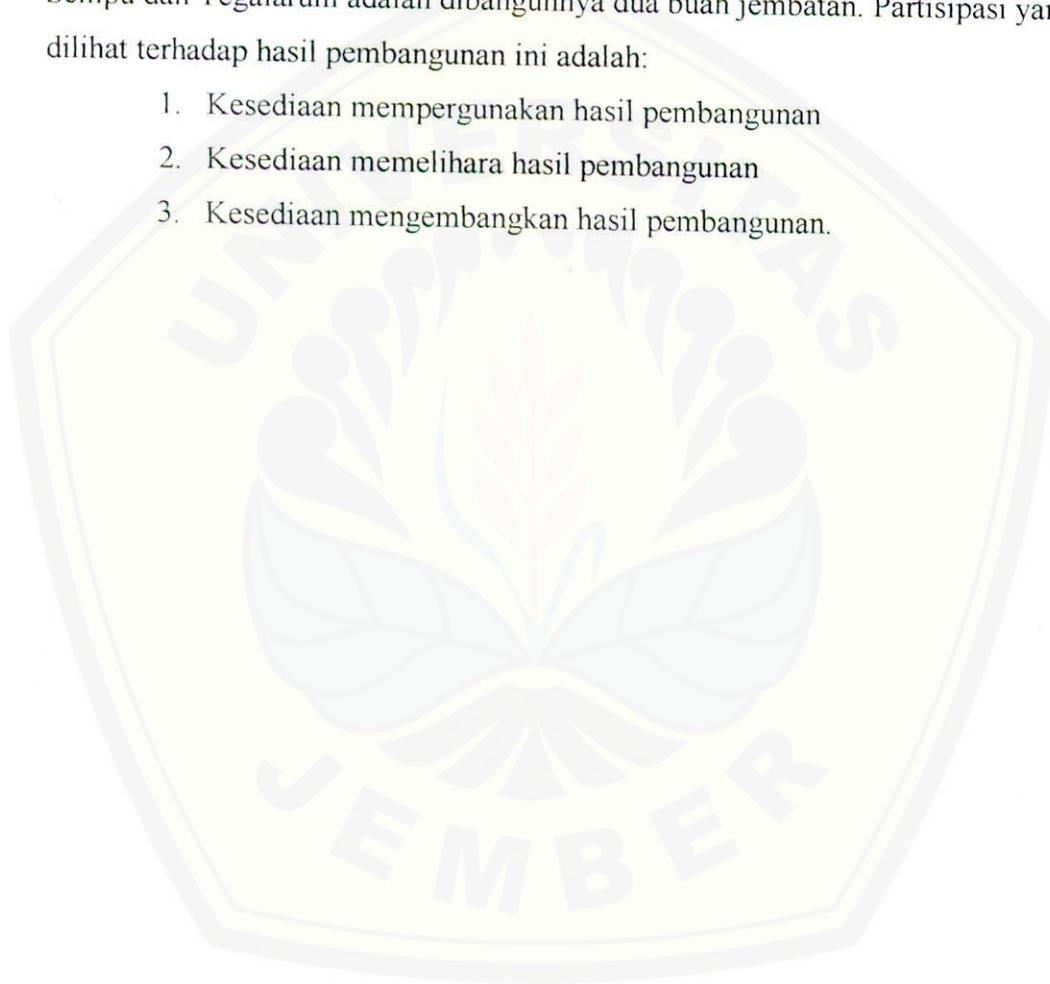
\*Sumber data primer

### 3.3.3 Partisipasi terhadap hasil pembangunan

Partisipasi terhadap hasil pembangunan adalah kesediaan untuk ikut bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Disini bentuknya dapat berupa kesediaan untuk memanfaatkan, mempergunakan, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan tersebut.

Hasil pembangunan fisik progam P2KP di wilayah BKM Kenanga desa Sempu dan Tegalarum adalah dibangunnya dua buah jembatan. Partisipasi yang dapat dilihat terhadap hasil pembangunan ini adalah:

1. Kesediaan mempergunakan hasil pembangunan
2. Kesediaan memelihara hasil pembangunan
3. Kesediaan mengembangkan hasil pembangunan.



Tabel 5

Skor jawaban responden terhadap indikator partisipasi terhadap hasil pembangunan

N	Item Responden			Jumlah
	1	2	3	
1	2	1	1	4
2	2	2	2	6
3	2	2	2	6
4	2	2	2	6
5	2	1	1	4
6	2	1	1	4
7	2	1	1	4
8	2	1	1	4
9	2	1	1	4
10	2	1	1	4
11	2	2	2	6
12	2	2	2	6
13	2	2	2	6
14	2	1	1	4
15	2	1	1	4
16	2	1	1	4
17	2	2	2	6
18	2	1	1	4
19	2	1	2	5
20	2	2	1	5
21	2	2	1	5
22	2	2	2	6
23	2	2	2	6
24	2	2	2	6
25	1	1	1	3
26	2	1	2	5
27	2	2	2	6
28	1	2	1	4
29	1	2	1	4
30	1	1	1	3
31	1	1	1	3
32	2	2	2	6
33	2	1	2	5
34	2	1	2	5
35	2	2	2	6
36	1	1	1	3
37	2	2	2	6
38	1	2	1	4
39	1	1	1	3
40	2	2	2	6
41	2	1	2	5
42	2	1	2	5

43	1	2	1	4
44	1	2	1	4
45	1	2	2	5
46	2	1	2	5
47	2	2	2	6
48	1	2	1	4
49	2	1	2	5
50	2	1	2	5
51	1	2	1	4
52	2	2	2	6
53	1	2	1	4
54	1	2	1	4
55	1	2	1	4
56	2	2	2	6
57	1	1	2	4
58	1	2	1	4
59	2	2	1	5
60	2	1	2	5
61	2	2	2	6
62	1	2	1	4
63	1	2	1	4
64	2	2	2	6
65	2	1	2	5
66	1	2	1	4
67	2	2	2	6
68	2	2	2	6
69	2	2	2	6
70	2	2	2	6
71	1	2	1	4
72	2	1	2	5

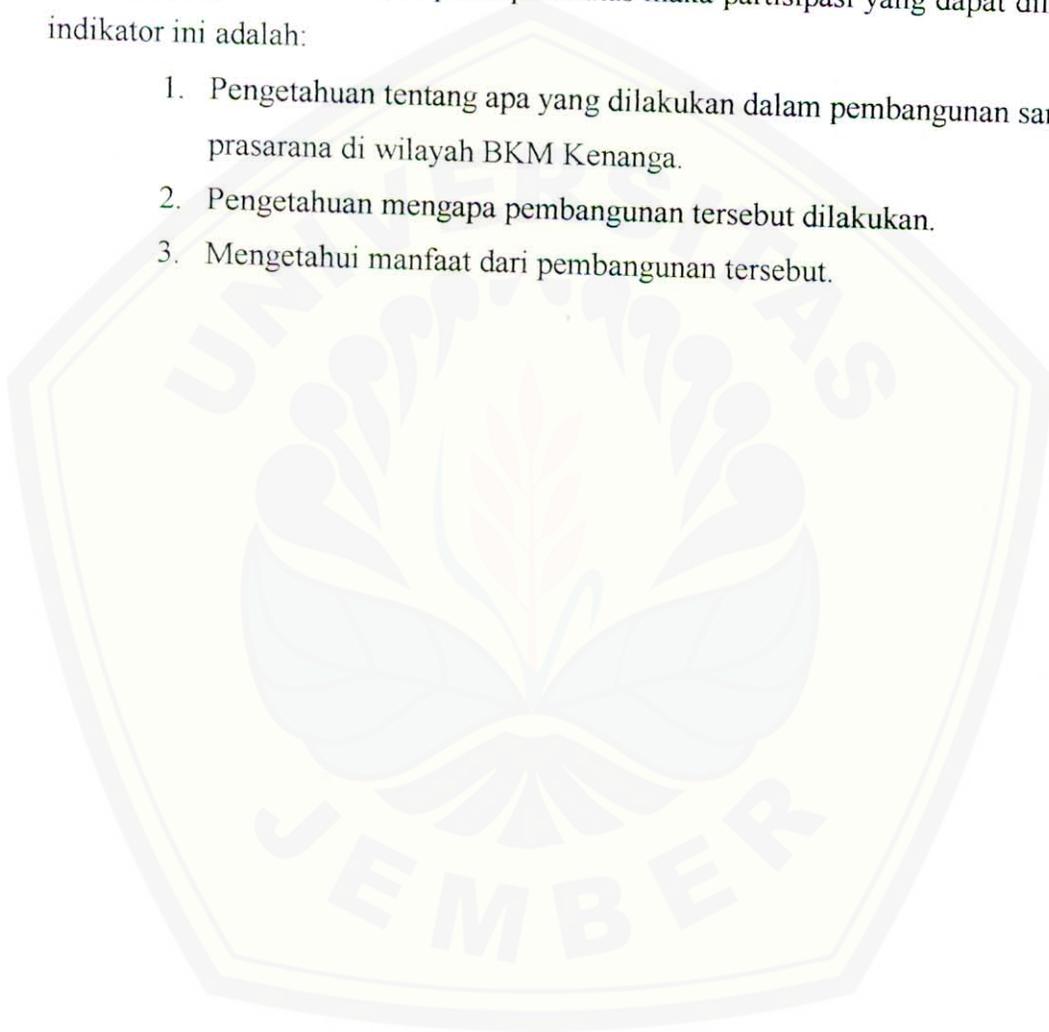
\*Sumber data primer

### 3.3.4 Partisipasi dalam Evaluasi

Evaluasi adalah upaya mendokumentasikan apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan "apa yang terjadi" adalah berupa pembangunan jembatan dan mengapa jembatan tersebut dibangun.

Evaluasi juga berarti suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program. Dari kedua pendapat diatas maka partisipasi yang dapat dilihat dari indikator ini adalah:

1. Pengetahuan tentang apa yang dilakukan dalam pembangunan sarana dan prasarana di wilayah BKM Kenanga.
2. Pengetahuan mengapa pembangunan tersebut dilakukan.
3. Mengetahui manfaat dari pembangunan tersebut.



**Tabel 6**  
**Skor jawaban responden terhadap indikator partisipasi dalam evaluasi**

N	Item Responden			Jumlah
	1	2	3	
1	2	2	1	5
2	2	1	2	5
3	2	2	2	6
4	2	2	1	5
5	2	1	1	4
6	2	2	1	5
7	2	2	2	6
8	2	1	1	4
9	2	2	2	6
10	2	2	2	6
11	2	2	2	6
12	2	2	2	6
13	2	1	1	4
14	2	1	1	4
15	2	1	1	4
16	2	1	1	4
17	2	2	2	6
18	2	1	1	4
19	2	1	2	5
20	2	2	2	6
21	2	2	2	6
22	2	2	2	6
23	1	1	1	3
24	2	2	2	6
25	2	2	2	6
26	2	1	1	4
27	2	2	2	6
28	2	2	2	6
29	2	1	2	5
30	2	1	1	4
31	2	1	1	4
32	2	2	2	6
33	2	1	2	5
34	2	1	2	5
35	2	2	2	6
36	2	2	2	6
37	2	2	2	6
38	2	2	2	6
39	2	1	1	4
40	2	2	2	6
41	2	1	2	5
42	2	1	2	5
43	2	1	2	5
44	2	2	2	6

---

45	2	1	2	5
46	2	1	1	4
47	2	2	2	6
48	2	1	2	5
49	2	2	2	6
50	2	2	2	6
51	2	2	2	6
52	2	2	2	6
53	2	1	1	4
54	1	1	1	3
55	2	1	1	4
56	2	2	2	6
57	2	1	1	4
58	1	1	1	3
59	1	1	2	4
60	2	2	2	6
61	2	1	1	4
62	2	1	2	5
63	2	1	2	5
64	2	2	2	6
65	2	2	2	6
66	2	2	2	6
67	2	2	2	6
68	2	1	1	4
69	2	1	2	5
70	2	2	2	6
71	1	1	1	3
72	2	2	2	6

Variabel partisipasi masyarakat mempunyai 14 item, sehingga untuk skor tertinggi adalah 28 dan skor terendah adalah 14. Sehingga untuk pengelompokan interval kelasnya sebagai berikut:

- Untuk skor total 14 - 21 termasuk kategori rendah.
- Untuk skor total 22 - 28 termasuk kategori tinggi.

Selanjutnya dari data skor diatas dapat dihitung dan dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi seperti dibawah ini.

**Tabel 7**  
**Distribusi frekuensi partisipasi masyarakat**

Kategori	Frekuensi	Prosentasi
Tinggi	42	58,3
Rendah	30	41,6
Jumlah	72	100%

\*Sumber: Skor jawaban kuisisioner partisipasi masyarakat.

Dari data diatas maka dapat kita lihat dari 72 orang responden maka 42 orang partisipasi mereka cukup tinggi dan 30 orang menyatakan bahwa partisipasi mereka adalah rendah.

Tabel 8

Kategori jawaban tingkat pendidikan formal dan partisipasi masyarakat

N	Kategori	Kategori
1	R	R
2	T	T
3	T	T
4	T	T
5	R	R
6	R	T
7	T	T
8	R	T
9	T	T
10	T	T
11	T	T
12	T	T
13	T	T
14	R	R
15	R	R
16	R	R
17	T	T
18	R	R
19	T	R
20	T	T
21	T	T
22	T	T
23	T	R
24	T	T
25	R	T
26	R	T
27	T	T
28	T	T
29	T	R
30	R	R
31	R	R
32	T	T
33	T	T
34	T	R
35	T	T
36	T	R
37	T	T
38	R	R
39	R	R
40	T	T
41	T	T
42	T	T
43	T	R
44	T	R
45	R	T
46	R	T

47	T	T
48	T	R
49	T	R
50	T	T
51	T	T
52	T	T
53	R	R
54	R	R
55	T	R
56	T	T
57	R	T
58	R	R
59	R	T
60	T	T
61	T	T
62	T	T
63	T	T
64	T	R
65	T	R
66	R	R
67	R	R
68	R	T
69	T	T
70	T	R
71	R	T
72	T	T

\*Sumber: Data primer.

**BAB V****PENUTUP****5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisa dan interpretasi data yang telah penulis lakukan, maka penulis berusaha menyimpulkan yaitu bahwa berdasarkan analisa statistik yang telah kami lakukan, maka diperoleh  $X^2$  hitung sebesar 5,207. Selanjutnya penelitian ini kami menggunakan taraf signifikansi 5% dengan  $db = 1$ , kemudian setelah dicocokkan dengan tabel  $X^2$  ditemukan angka sebesar 3,84. Hal ini menunjukkan bahwa  $X^2$  hitung lebih besar dari  $X^2$  tabel, sehingga hipotesis kerja diterima dan hipotesis nol ditolak. Dengan demikian ternyata terbukti bahwa tingkat pendidikan formal berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.

**5.2 Saran**

Akhirnya sebagai penutup penulis menyampaikan beberapa saran guna lebih meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjamin keberlangsungan dari program P2KP, yaitu:

1. Penelitian ini merupakan informasi awal untuk penelitian berikut terutama penelitian yang sifatnya multi varian.
2. Mengingat keberlangsungan program P2KP ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, maka hendaknya pemerintah benar-benar bisa memahami aspirasi dari masyarakat sasaran.
3. Pada penulisan kali ini penulis berusaha untuk membedakan keterlibatan masyarakat apakah termasuk partisipasi atau hanya mobilisasi, sehingga dari pembedaan tersebut dapat ditemuklan strategi pembangunan yang tepat terutama dalam hal pelibatan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bryant, Coralie & L.G White, 1989, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Diterjemahkan R. L. Simatupang, LP3ES, Jakarta.
- Korten, David C. & Sjahrir, 1988, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Diterjemahkan A. Setiawan Abadi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Azhari, Abdul Kholiq, 1992, *Diktat Kuliah Teori Pembangunan*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik – Universitas Jember, Jember.
- Ndraha, Taliziduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ihsan, Fuad, 1996, *Dasar-Dasar Kependidikan; Komponen MKDK*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Davis, Keith, 1977, *Human Behaviour At Work, Organisation Behaviour*, Fota M.C. Graw Hill Publishing, New Delhi.
- Koentjoroningrat, 1991, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Loedin, A.A., 1976, *Pengantar Pengetahuan Dasar Penelitian*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Siegel, Sidney, 1994, *Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Singarimbun, Masri & Sofyan Effendi, 1989, *Metode Penelitian Dan Survej*, LP3ES, Jakarta.
- Surachmad, Winarno, 1985, *Dasar Dan Teknik Research*, CV. Tarsito Bandung.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1981, *Tahap-Tahap Penelitian Sosial*, UGM, Yogyakarta.
- Pasaribu, ILB. Simandjuntak, 1988, *Sosiologi Pembangunan*, Tarsito, Bandung.
- Koontz, Harold, Cyril O'Donnell & Heinz Weihrich, 1996, *Manajemen*, Erlangga, Jakarta.

- Jones, Charles O'Jones, 1996, *Pengantar Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darmawi, Drs Herman Darmawi, 2000, *Manajemen Resiko*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian, Prof. DR. Sondang P. Siagian, 1996, *Fungsi-fungsi Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahjoetomo, 1993, *Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun: Problematik dan Alternatif Solusinya*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Badan Penerbit Universitas Jember, 1997, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember.
- Uphoff, Norman T. Cohen, John M., 1979, *Feasibility and Application of Rural Development Participation, A State of Art Paper*, Rural Development Committee Center of International Studies Cornell university, New York.
- Sumartopo, 2000, *Pengambilan keputusan*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.









Tabel C. Tabel Harga-harga Kritis Chi-Kuadrat\*)

Kemungkinan di bawah  $H_0$  bahwa  $\chi^2 \geq$  chi-kuadrat

df	.99	.90	.85	.80	.70	.60	.50	.40	.30	.20	.10	.05	.02	.01	.001
1	.00010	.00063	.0039	.010	.054	.16	.46	1.07	1.64	2.71	3.84	5.41	6.64	10.83	
2	.02	.04	.10	.21	.45	.71	1.39	2.41	3.22	4.60	5.99	7.82	9.21	13.82	
3	.12	.18	.35	.58	1.00	1.42	2.37	3.66	4.64	6.25	7.82	9.84	11.34	16.27	
4	.30	.43	.71	1.06	1.65	2.20	3.36	4.88	5.99	7.78	9.49	11.67	13.28	18.46	
5	.65	.75	1.14	1.61	2.34	3.00	4.35	6.00	7.29	9.24	11.07	13.39	15.09	20.52	
6	.87	1.13	1.64	2.20	3.07	3.83	5.35	7.23	8.56	10.64	12.59	15.03	16.81	22.46	
7	1.24	1.50	2.17	2.83	3.82	4.67	6.35	8.38	9.80	12.02	14.07	16.62	18.47	24.32	
8	1.65	2.03	2.73	3.49	4.59	5.53	7.34	9.52	11.03	13.36	15.51	18.17	20.09	26.12	
9	2.09	2.53	3.32	4.17	5.38	6.39	8.34	10.60	12.24	14.68	16.92	19.68	21.67	27.88	
10	2.56	3.06	3.94	4.86	6.18	7.27	9.34	11.78	13.44	15.99	18.31	21.16	23.21	29.59	
11	3.05	3.61	4.58	5.58	6.99	8.15	10.34	12.60	14.63	17.26	19.68	22.62	24.72	31.20	
12	3.57	4.18	5.23	6.30	7.81	9.03	11.34	14.01	15.81	18.55	21.03	24.05	26.22	32.91	
13	4.11	4.76	5.89	7.04	8.63	9.93	12.34	15.12	16.98	19.81	22.36	25.47	27.69	34.53	
14	4.66	5.37	6.57	7.79	9.47	10.82	13.34	16.22	18.15	21.06	23.68	26.87	29.14	36.12	
15	5.23	5.96	7.26	8.56	10.31	11.72	14.34	17.32	19.31	22.31	25.00	28.26	30.58	37.70	
16	5.81	6.61	7.96	9.31	11.15	12.62	15.34	18.42	20.46	23.54	26.30	29.63	32.00	39.29	
17	6.41	7.26	8.67	10.08	12.00	13.53	16.34	19.51	21.62	24.77	27.59	31.00	33.41	40.75	
18	7.02	7.91	9.39	10.86	12.86	14.44	17.34	20.60	22.76	25.99	28.87	32.35	34.80	42.31	
19	7.63	8.57	10.12	11.65	13.72	15.35	18.34	21.69	23.90	27.20	30.14	33.69	36.19	43.82	
20	8.26	9.24	10.85	12.44	14.58	16.27	19.34	22.78	25.04	28.41	31.41	35.02	37.57	45.32	
21	8.90	9.62	11.59	13.24	15.44	17.18	20.34	23.86	26.17	29.62	32.67	36.34	38.93	46.80	
22	9.54	10.00	12.34	14.04	16.31	18.10	21.24	24.94	27.30	30.81	33.92	37.66	40.29	48.27	
23	10.20	11.29	13.09	14.85	17.10	19.02	22.34	26.02	28.43	32.01	35.17	38.97	41.64	49.73	
24	10.86	11.99	13.85	15.60	18.06	19.94	23.34	27.10	29.55	33.20	36.42	40.27	42.98	51.18	
25	11.52	12.70	14.61	16.47	18.94	20.87	24.34	28.17	30.68	34.38	37.65	41.57	44.31	52.62	
26	12.20	13.41	15.38	17.29	19.82	21.79	25.34	29.25	31.80	35.56	38.88	42.80	45.64	54.05	
27	12.88	14.12	16.15	18.11	20.70	22.72	26.34	30.32	32.91	36.74	40.11	44.14	46.96	55.48	
28	13.56	14.83	16.93	18.94	21.59	23.65	27.34	31.39	34.03	37.92	41.34	45.42	48.28	56.89	
29	14.26	15.57	17.71	19.77	22.48	24.58	28.34	32.46	35.14	39.09	42.56	46.69	49.59	58.30	
30	14.95	16.31	18.49	20.60	23.36	25.51	29.34	33.53	36.25	40.20	43.77	47.90	50.89	59.70	

\*) Tabel C diringkaskan dari Tabel IV dalam Fisher dan Yates: *Statistical tables for biological, agricultural, and medical research*, diterbitkan oleh Oliver and Boyd Ltd. Edinburgh, dengan izin para penulis dan penerbit.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER

LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37, Telepon (0331) 337818, JEMBER 68121  
E-mail : lemlit unej @ jember.telkom.net.id

Nomor : /009/J25.3.1/PL.5/2001  
Lampiran : -  
Perihal : *Permohonan ijin melaksanakan penelitian* 15 Agustus 2001

Kepada : *Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi  
di -*

BANYUWANGI.

Menunjuk surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember No. 2916/J25.1.2/PL.5/2001 Tanggal 14 Agustus 2001, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama/NIM : AHMAD FAUZI / 96-1096  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik/Administrasi Negara  
Alamat : Jl. Bangka III/19 Jember.  
Judul Penelitian : Pengaruh Pendidikan Formal Terhadap Partisipasi Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sempu Dan Tegalarum Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Program P2KP.  
Lokasi : Kabupaten Banyuwangi.  
Lama Penelitian : 1 (satu) bulan.

maka kami mohon dengan hormat bantuan serta perkenan saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara disampaikan terima kasih.

Ketua,  
  
DR. H. T. Sutikto, MSc.  
NIP. 131 131 022

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs.
3. Arsip



Banyuwangi, 16 Agustus 2001

Nomor : 072 / 376 / 439.206 / 2001

Sifat : Biasa

Lampiran :

Perihal : IJIN SURVEY tentang Pengaruh Pendidikan formal terhadap Partisipasi dalam pembangunan Fisik di desa Sempu dan Tegalarum Study tentang Partisipasi masyarakat dalam program P2KP.

Kepada

Yth. Sdr. Camat SEMPU

di

SEMPU

Menunjuk Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember  
Tanggal 15 - 8 - 2001 Nomor : 1005 / J25. 3 . 1 / PL . 5 / 2001  
Perihal sebagaimana tersebut pada

pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa :

Sdr. AHMAD FAUZI.

selaku petugas survey dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember .

akan mengadakan penelitian di Kantor / Wilayah Saudara selama 1 ( satu ) Bulan terhitung tanggal surat dikeluarkan dan diharapkan kesediaan Saudara untuk membantunya

Setelah selesai melakukan penelitian, yang bersangkutan agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan KESBANG dan Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Daftar nama peserta / pengikut :  
TEMBUSAN : Disampaikan Kepada

Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab.  
Banyuwangi.

Sempu , 13 September 2001

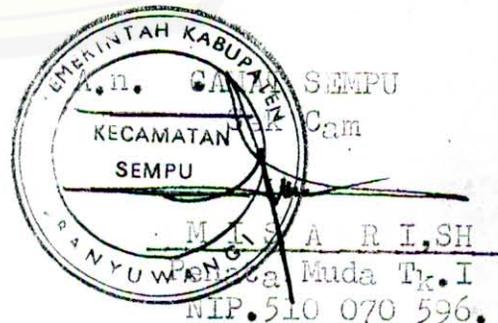
Nomor : 072/433/439.420/2001      K e p a d a  
Sifat : Penting      Yth, ①. Sdr. Kepala Desa Sempu  
Lampiran : -      2. "      " Tegalarum  
Perihal : Survey tte Partisipasi  
Masy. dalam Program P2KP.

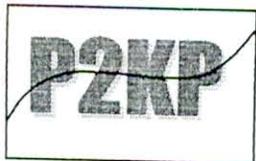
Menunjuk surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Banyuwangi, tanggal 16 Agustus 2001, Nomor. 072/376/439.206/200 Perihal tersebut pada pokok surat diatas, bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : ACHMAD FAUZI  
Pekerjaan : Petugas survey dari Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

akan mengadakan penelitian di Kantor/Wilayah saudara selama 1(satu)bulanterhitung mulai tanggal 15 Agustus 2001 s/d tanggal 15 September 2001 dan diharapkan kesediaan saudara untuk membantu .

Demikian untuk menjadi maklum.





PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN  
BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT

“ KENANGA ”

DESA SEMPU-TEGALARUM KEC.SEMPU BANYUWANGI

Akta Notaris No. 8/ 2000/ Imron Agis Kadir

D/a : Kantor Desa Sempu , Jl.Raya Kalisetail 157 Sempu 68465 ( 0333) 844020, 846732, 081-234-84819

Surat Keterangan

No. 073/ IX/ K-KNG/A4/2001

Yang bertanda tangan ini ketua BKM (Bandan Keswadayaan Masyarakat) Kenanga, desa Sempu dan Tegalarum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : AHMAD FAUZI  
Mahasiswa : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember  
Alamat : Jl. Bangka III/19 Jember

Telah melaksanakan penelitian pada masyarakat anggota BKM Kenanga desa Sempu dan Tegalarum, Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi mulai tanggal 15 Agustus s/d 15 September 2001.

Demikian surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua BKM Kenanga

Haris Kunaifi, Amd)

Sekretaris